

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

(Studi Kasus di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Akuntansi Syari'ah



Disusun Oleh

ILSA RUSMIATI

(1805046038)

AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4(Empat) sks

Hal : Naskah Skripsi

A.n Sdri Ilsa Rusmiati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Asalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ilsa Rusmiati

NIM : 1805046038

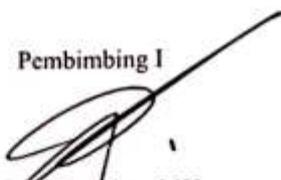
Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Tranparansi, Partisipasi Masyarakat, Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wasalamualaikum Wr. Wb

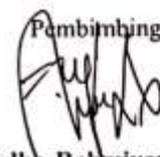
Semarang, 10 Maret 2023

Pembimbing I


Drs. Saekhu, MH.

NIP. 196901201994031004

Pembimbing II


Firdha Rahmivanti, M.A

NIP. 199193162019032018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Ilsa Rusmiati
NIM : 1805046038
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Pengaruh Akuntabilitas, Tranparansi, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan).**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal

16 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai perlengkapan ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Starata I/ S1) dalam ilmu Akuntansi Syariaah.

Semarang, 16 Juni 2023

Ketua Sidang

Mashilal, M.Si

NIP.198405162019031005

Penguji I

Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A

NIP. 195902151985031005

Dosen Pembimbing I

Drs. Saekhu M.H

NIP. 196901201994031004

Sekretaris Sidang

Drs. Saekhu M.H

NIP. 196901201994031004

Penguji II

Nurudin, SE., MM

NIP.199005232015031004

Dosen Pembimbing II

Firdha Rahmiyanti, M.A

NIP. 199103162019032018



MOTTO

الشفافيه تدعو الى الشراكة

Transparancy Invite Participation

Transparansi Undang Partisipasi

(Prof. Dr. H. Mujiyono Abdillah, M.A)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah berkat rahmat Alloh SWT, dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkan kepada kedua Orang Tua tercinta yang paling berharga dalam hidup saya, terimakasih karena selalu menjaga saya dalam setiap do'a- do'anya selalu memberikan nasihat, motivasi, dukungan dalam segala hal apapun, serta perhatian dan kasih sayang yang tidak terhingga. *Rabbighfirlil waliwalidayya warhamhuma kama robbayani saghiro.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang seharusnya ditulis dengan huruf Arab akan tetapi disalin kedalam huruf latin oleh karena itu untuk menjaga konsistensi maka perlu ditetapkan transliterasi. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan R.I menetapkan pedoman transliterasi dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0643/U/1987 sebagai berikut :

A. Konsonan

ا	A	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اِى = Ay

اِو = Aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misal: نُكُلِّ (Tsumma)

(*Bikulli*)

E. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya اَلْحَسْبِ (*Alhisabi*)

F. Marbuthah

Ta' marbuthah ditulis dengan huruf “ h” apabila *ta' marbutah* mati atau dibaca seperti berharkat sukun misalnya اَلْمَعِشَةُ (*Alma'isyah*)

ABSTRACT

Law No. 6 concerning Villages is a meaningful legal basis for villages, with the existence of this Law it can be a way for the implementation of development in every village in Indonesia. With village funds in manajemen off village funds, problems often arise, one of which is corruption cases. Therefore, This study aims to determine the effect of accountability, transparency and community participation in managing village funds on community empowerment in Tambakaji Village, Ngaliyan District.

This research is quantitative study with a sample size of 50 respondents. The sample in this study is the community in the Tambakaji Village, Ngaliyan District, who are 17 years old or have legal competence. The sampling method used a purposive sampling technique, the data collection for this study was by distributing questionnaires and then the data was processed and analyzed using multiple linear regression analysis using the SPSS version 25 application.

The results of this study indicate that accountability, transparency, and community participation in management of village funds has a positive effect on community empowerment in Tambakaji Village, Ngaliyan District.

Keywords: Accountability, Transparency, Community Participation, Community Empowerment.

ABSTRAK

Undang-undang no 6 tentang Desa merupakan landasan hukum yang berarti bagi desa, dengan adanya Undang-undang tersebut dapat menjadi jalan bagi terselenggaranya pembangunan di setiap desa di Indonesia. Dengan adanya dana desa, dalam pengelolaannya dana desa ini sering terjadi permasalahan yang timbul salah satunya yaitu korupsi, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 50 responden, sampel pada penelitian ini yaitu masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan yang telah berusia 17 tahun atau telah cakap hukum. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling, pengambilan data penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kemudian data diproses dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillah, berkat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Ṣalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Sarjana 1 Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini merupakan kajian tentang **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan”**

Penulisan skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H Muhammad Saifullah M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.,Ak.,CA sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Warno, S.E., M. Si., SAS selaku Sekretaris jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Drs. Saekhu, MH. sebagai Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Firdha Rahmiyanti, M.A. sebagai Dosen Pembimbing dua yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

8. Staff beserta karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa membantu dalam proses administrasi dalam proses penyusunan skripsi.
9. Orang tua tercinta tercinta yang paling berharga dalam hidup saya, terimakasih karena selalu menjaga saya dalam setiap do'a- do'anya selalu memberikan nasihat, motivasi, dukungan dalam segala hal apapun, serta perhatian dan kasih sayang yang tidak terhingga. *Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama robbayani saghiro.*
10. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala bantuan yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya, semoga segala bantuan dan dukungannya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwasanya karya ini jauh dari kata sempurna. Sehingga, mengharapkan keritik dan saran dari para Pembaca yang bersifat memperbaiki dan membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya

Semarang, 8 Maret 2023

Penulis



Ilsa Rusmiati

NIM. 1805046038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Theory.....	8
2.1.1. <i>Theory Agency</i>	8
2.1.2. Desa.....	9
2.1.2. Akuntabilitas.....	14
2.1.3. Transparansi.....	19
2.1.4. Partisipasi Masyarakat.....	21

2.1.5. Pemberdayaan Masyarakat	24
2.2. Penelitian Terdahulu.....	27
2.3. Kerangka Teori.....	29
2.4. Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III	
3.1. Objek Penelitian	32
3.2. Jenis Penelitian	32
3.3. Populasi dan Sampel	32
3.4. Teknik Pengambilan Sampel.....	33
3.5. Definisi Operasional Variabel	34
3.6. Teknik Analisis Data	36
BAB IV	
4.1. Gambaran Umum Kelurahan Tambakaji	42
4.2. Deskriptif Data	45
4.3. Uji Kelayakan Data	46
4.3.1 Uji Validitas	46
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	48
4.4. Uji Asumsi Klasik	48
4.4.1 Uji Normalitas	48
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	51
4.4.3 Uji Heterokdastisitas.....	52
4.5. Uji Hipotesis.....	53
4.5.1 Uji Regresi.....	53
4.5.3 Uji Parsial (<i>t- test</i>)	55
4.5.3 Uji Simultan (<i>f-test</i>).....	58
4.5.4 Uji Koefisien Determinasi	58
4.6. Pembahasan	59
4.7. Intepretasi	61
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Operasional Variabel dan Indikator	34
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan	44
Tabel 4.2 Karakteristik Jenis Kelamin Responden.....	45
Tabel 4.3 Karakteristik Usia Responden	46
Tabel 4.4 Karakteristik Pekerjaan Responden.....	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Kolmogorov Smirnov</i>	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas.....	52
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	53
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	54
Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (<i>t-test</i>).....	56
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (<i>f-Test</i>)	59
Tabel 4.13 Hasil Uji Deteminasi (R^2).....	59
Tabel 4.14 Hasil Hipotesis	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian	29
Gambar 4.1 Peta Kelurahan Tambakaji.....	44
Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas	49
Gambar 4.3 Grafik Plot Uji Normalitas	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian.....	70
Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian.....	71
Lampiran 3 : Karakteristik Responden.....	74
Lampiran 4 : Jawaban Responden.....	75
Lampiran 5 : Dokumentasi Responden	76
Lampiran 6 : Hasil Ouput SPSS	76
Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan wilayah hukum terkecil yang pernah ada dan terbentuk dengan sejarah keberadaan masyarakat Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permintaan keberadaan masyarakat Indonesia. Desa berhubungan langsung dengan masyarakat desa dan memegang peranan penting dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat dengan batas wilayah yang berwenang menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan.¹ Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 tentang Desa ini menjadi landasan hukum yang sangat berarti bagi setiap desa, karena undang-undang tersebut dapat memberikan pijakan dalam pembangunan perkembangan desa.

Dengan adanya UU Desa No 6 ini menjadi landasan hukum yang sangat penting bagi setiap desa, karena UU ini dapat menjadi jalan bagi terselenggaranya pembangunan di setiap desa di Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui peningkatan dasar dasar pedesaan, pengembangan batas moneter terdekat, dan penggunaan dana dan sumber daya alam, daerah pedesaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dana pedesaan dapat berkelanjutan secara ekologis. Dana desa yang disediakan negara merupakan sumber pendapatan terbesar bagi desa, dan pendapatan tersebut menimbulkan masalah pengelolaan baru, sehingga aparat desa harus mampu mengelola dana desa yang antara lain berlaku untuk permukiman yang diatur undang-undang, yang dalam pengelolaannya harus transparan dan juga mampu peduli dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengumumkan anggaran Dana Desa akan meningkat sebesar 2 triliun menjadi 72 triliun pada tahun 2020, angka tersebut naik dari tahun 2019 yang hanya sekitar 70 triliun anggaran tersebut difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat dan untuk meningkatkan potensi ekonomi Desa, dihadapan DPR/MPR Presiden

¹ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Joko Widodo mengungkapkan bahwa peningkatan tersebut ditujukan untuk memperkuat masyarakat pedesaan dan mengembangkan ekonomi desa.² Dengan bertambahnya dana desa tentunya akan berdampak baik bagi pemberdayaan masyarakat, seperti infrastruktur desa yang memadai, perbaikan jalan dan pos kesehatan, namun menambah dana tersebut jika pengelolaannya tidak dengan keterampilan yang baik dan tepat. menyebabkan masalah karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dengan baik dan benar.

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 tentang pengelolaan dana desa dimana pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif dilaksanakan sesuai dengan disiplin anggaran.³ Dengan adanya peraturan tersebut pada tahun 2021 permasalahan yang timbul dan pengelolaan dana desa semakin meningkat *Indonesian Corruption Watch (ICW)* menyebutkan bahwa ada 154 desa yang terkena kasus korupsi.⁴ Dengan adanya kasus tersebut sehingga menyebabkan terhambatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu agar kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik maka dalam pengelolaannya harus berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif agar dapat meminimalisir kasus tersebut.

Akuntabilitas merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan suatu pemerintah dalam mendapatkan kepercayaan publik dan merupakan salah satu parameter dari tinggi rendahnya hubungan partisipasi masyarakat antara pemerintah dan kesenjangan masyarakat.⁵

Akuntabilitas adalah sebuah bentuk untuk mewakili kemenangan atau kekecewaan dalam mencapai tujuan atau fokus yang telah dilakukan baik di masa lalu dan masa depan, untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas

² Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, '2020, Dana Desa Fokus Pada Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa', *Kemenkopmk.Go.Id*, 2020 <<https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa>> [accessed 3 September 2021].

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa (2014)

⁴ Databoks, 'ICW : Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021', (Di Akses pada 4 Februari 2023) di halaman : <https://databoks.kadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>.

⁵ Adnan Siti Umaira, 'Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi(JIMEKA)*, Vol. 4, (2019), 472.

diperlukan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat.⁶

Transparansi merupakan keterbukaan yang sejati dan inklusif, serta menjadi dasar bagi partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya, karena adanya transparansi masyarakat dapat sungguh-sungguh juga global dan memberikan tempat untuk kepentingan dinamis semua lapisan masyarakat selama waktu yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya adanya transparansi dapat memberikan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat karena adanya transparansi masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Hasil penelitian sebelumnya oleh Matia Andriani menunjukkan bahwa transparansi berdampak positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Transparansi benar-benar mencakup transparansi dan keterbukaan, menciptakan ruang bagi partisipasi aktif semua lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya, transparansi membawa kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui transparansi, memberikan masyarakat informasi yang akurat dan relevan.⁷

Partisipasi dalam masyarakat berarti bahwa masyarakat secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan dan menyampaikan aspirasinya melalui lembaga perwakilan masyarakat.⁸ Salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat desa yaitu dengan adanya keterlibatan masyarakat, termasuk partisipasi masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi, kelangsungan hidup di masyarakat, keterlibatan masyarakat yaitu masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah mengelola dan mengevaluasi kinerja pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.⁹ Menurut hasil penelitian sebelumnya Supami

⁷ Matia Andriani, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa', 2018.

⁶Ibid, Matia Andriani... Hal. 11.

⁸ Mardiasmo. 2002. "*Akuntansi Sektor Publik*". Yogyakarta: Andi Offset

⁹Supami Wahyu Sulisty, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa', *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Volume 7, (2019), 9.

Wahyu Sulisty, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa, adanya partisipasi masyarakat sangat membantu dalam menunjang pembangunan desa.¹⁰

Dengan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa menciptakan peluang pekerjaan atau perbaikan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari pemberdayaan masyarakat pada dasarnya yaitu untuk membantu pengembangan perekonomian bagi masyarakat yang rentan dan miskin dengan mengembangkan bakat dan memungkinkan untuk menjadi kreatif dan aktif finansial dan dapat menjadikan masyarakat lebih mandiri dan segala kebutuhannya dapat terpenuhi. Dari hasil penelitian terdahulu Siti Ainul Wida, Dkk menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa telah diterapkan dengan baik sehingga berpengaruh Positif terhadap pengelolaan dana Desa.¹¹ Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supami Wahyu Sulisty dan Matia Andriani Menyatakan bahwa akuntabilititas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana Desa, penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Indra Hermawan, Dkk Menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap daya guna pengalokasian dana Desa.¹²

Pengelolaan Keuangan dana desa harus dikaji dengan baik terhadap pengelolaan pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat harus dikelola sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan

¹⁰ Ibid, Supami Wahyu Sulisty... Hal. 9.

¹¹Siti Ainul Wida, Dkk., 'Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kecamatan Rojongampi Kabupaten Banyuwangi', *E- Journal Ekonomi Dan Akuntansi*, Voume IV ((2017), 148–52.

¹² Ridwan Indra Hermawan, Dkk., Jurnal Akuntansi Aktiva, Pengaruh Akuntabilitas, and Transparansi D A N Partisipasi, 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah', 2.2 (2021), 153–59.

partisipasi maka dari itu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan. Di Kelurahan Tambakaji terdapat banyak potensi yang dimiliki salah satunya yaitu membuat kerajinan souvenir, kerajinan souvenir ini merupakan kerajinan tangan ibu-ibu yang berisi produk-produk berupa dompet, sepatu, tas rajut, olahan kain perca tema tisu dari pelepah pisang dan kain flanel. Kerajinan souvenir ini terdapat di Kelurahan Tambakaji RW IV akan tetapi banyak masyarakat dari RW lain yang ikut menampilkan hasil karyanya¹³

Dari hasil pra survey diketahui masih ada permasalahan - permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan diantaranya yaitu memiliki beberapa potensi untuk meningkatkan SDM namun tidak dikelola dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal,¹⁴ seharusnya potensi yang dimiliki harus dijalankan dengan baik maka dari itu diharapkan pemerintah mengelola dengan semaksimal mungkin agar potensi-potensi yang ada berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Dengan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul : **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Kasus Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan).**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan?
2. Apakah transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan?
3. Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan?

¹³ <https://tambakaji.semarangkota.go.id/berita/kampungsouvenir> di Akses pada 20 Juni 2023

¹⁴ Wawancara Ketua RW, Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kabupaten Semarang Jawa Tengah, September 2021

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dokumen evaluasi penggunaan anggaran dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
2. Ini memberikan informasi untuk mengoptimalkan keahlian masyarakat, khususnya bagi perangkat desa sebagai pengelola dana desa.
3. Dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempelajari topik serupa, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan khususnya bagi mahasiswa yang akan penelitian dana desa dan dapat digunakan untuk membandingkan hasil penelitian maupun ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada pembaca terkait dengan penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, berisi tentang penjelasan mengenai objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi tentang pembahasan hasil penelitian, yaitu tentang gambaran umum penelitian, deskriptif data penelitian pengujian, hasil analisis data pembahasan serta intrepetasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Theory

2.1.1. *Theory Agency*

Penelitian ini yaitu menggunakan *Theory keagenan (Agency Theory)* yaitu hubungan kontraktual antara principal dan agen dalam kerangka manajemen Theory keagenan yaitu kontak antara manajemen perusahaan sebagai (agen) dengan pemilik perusahaan sebagai (Principal) terjadinya hubungan kontraktual apabila pemilik perusahaan memberikan tugas kepada pihak manajemen untuk melaksanakan proses manajemen.¹⁵

Kaitan dengan entitas sektor publik dalam hal ini mencakup masyarakat sebagai *principal* dan perangkat desa sebagai *agen* sesuai dengan prinsip *Good governace* bahwa suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila dalam kelangsungannya ada keterlibatan masyarakat, maka masyarakat atau sebagai pemeran pihak pertama (*Principal*) akan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun masyarakat tidak mengungkapkan pendapatnya secara sembarangan dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia menjadi peranan yang sangat penting.¹⁶

Desa merupakan jabatan tingkat tertinggi yang akan mewakili pihak atau lembaga kedua dan bertugas mengelola dana desa mulai dari perencanaan hingga kebenarannya hasilnya, pemerintah desa dituntut untuk mengelola keuangan desa secara efisien dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan tangguh. Pemerintah desa juga harus mengikuti standar akuntabilitas yang jelas, dan transparan dengan meminta pendapat dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teori keagenan terkait dengan penelitian ini yaitu untuk memastikan apakah ada perangkat desa seperti lembaga pengabdian masyarakat yang dapat di andalkan oleh masyarakat untuk menerima dan mendengarkan

¹⁵ Ismail, Widagdo, Widodo. 2016 “ Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 19 (2) 328.

¹⁶ *Ibid*, Ismail Widagdo...

keinginannya dan bisa melayani masyarakat seefisien mungkin dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipercayakan. Efektivitas *Good governance* dapat dinilai dari baik buruknya akuntabilitas dan transparansi yang dilaksanakan. Akuntabilitas dan transparansi dapat diimplementasikan dengan adanya pertanggungjawaban pada setiap kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan memberikan akses informasi yang mudah agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai pengalokasian dana. Dengan demikian tujuan pemerintah desa untuk kebaikan masyarakat semua dapat tercapai semaksimal mungkin.

2.1.2. Desa

2.1.2.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2014, desa adalah kesatuan hukum yang berwenang menentukan wilayahnya, mengurus urusan pemerintahan, melindungi kepentingan masyarakat setempat melalui upaya advokasi, dan melindungi hak asal usul atau hak tradisional.¹⁷ Kepala Desa adalah nama lain dari Pemerintah Desa adalah bagian dari pemerintahan desa yang bertugas mengatur urusan desa, membina pertumbuhan desa, dan memperkuat status masyarakat desa. Perwakilan pemerintah daerah, pelaksana wilayah, dan pelaksana teknis, semuanya membentuk infrastruktur masyarakat. Perangkat desa yang tercantum dalam Pasal 48 ayat 1 bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Menurut Pemandagri No 20 Tahun 2018, Pemdес bertugas mengoordinasikan persoalan-persoalan masyarakat setempat dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸ Kepala desa atau dikenal dengan nama lain adalah unsur penyelenggara pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa. Sesuai dengan Pemandagri No 20 Tahun 2018, Badan

¹⁷ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Desa

Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan dan anggotanya dipilih secara demokratis sebagai wakil rakyat desa berdasarkan perwakilan daerah.

2.1.2.2 Dana Desa

Dana desa didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan dari APBN melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota kepada masyarakat. (APBD). Dana tersebut digunakan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan dukungan masyarakat. Dana desa dilindungi dalam konteks pengakuan negara terhadap desa sebagai agen formal masyarakat yang bertugas menangani urusan pemerintahan, hak dan kepentingan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam pertumbuhan desa.¹⁹ Masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan peraturan desa.

Paradigma desa dibentuk melalui Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa tidak lagi di anggap sebagai subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat dan mempromosikan pembangunanya desa telah diberikan kekuatan dan sumber daya keuangan yang cukup untuk mengelola asetna secara efektif, dan desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan dan menetapkan prioritas lingkungan berdasarkan inisiatif masyarakat.²⁰

Keharusan melakukan kegiatan swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di desa sangat menentukan dalam pengelolaan dana desa. Melalui pemerintahan sendiri, desa telah melakukan tugas dan melaksanakan prakarsa pembangunan mereka sendiri, memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk tujuan ini tetap berada dalam masyarakat. Dengan memakai tenaga kerja setempat diharapkan penerapan aktivitas tersebut

¹⁹ Direktorat Jenderal perimbangan dan keuangan, *Dana Desa untuk Kesejahteraan Desa*. 2017, Hal. 2.

²⁰ Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa

dapat meresap tenaga kerja serta membagikan pemasukan untuk mereka yang bekerja. Sedangkan pemakaian bahan baku lokal diharapkan akan memberikan pemasukan kepada warga yang mempunyai bahan baku tersebut.

2.1.2.3 Tujuan Dana Desa

Anggaran awal dana desa yaitu bertujuan untuk pembangunan desa, tujuan utama dari pembangunan desa adalah meningkatkan taraf hidup penduduk desa, meningkatkan kualitas hidup dan di pedesaan dengan memenuhi kebutuhan pokok, serta membangun infrastruktur desa, memaksimalkan potensi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pembangunan prasarana dan sarana desa, seperti pembangunan jalan dan penyedia puskesmas desa, merupakan tujuan utama anggaran dana desa sejak awal. Pemerintah kini lebih memfokuskan pada anggaran desa untuk memperkuat masyarakat menyediakan sumber daya untuk memaksimalkan baik potensi masyarakat secara keseluruhan maupun potensi desa setelah tujuan tersebut tercapai.²¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tujuan dana Desa adalah

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Membantu mereka yang dalam kemiskinan.
3. Mengembangkan ekonomi desa
4. Mengatasi Kesenjangan pembangunan antar desa, serta
5. Penguatan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan Dedikasi Negara untuk mewujudkan desa agar tumbuh menjadi entitas yang kuat, cerdas, otonom, dan demokratis yang dapat meletakkan dasar bagi administrasi masyarakat dan pertumbuhan menuju masyarakat yang adil, maju, dan berkembang. Selanjutnya juga diharapkan akan menjadi desa yang mandiri dimana :

²¹ Ibid. Direktoral Jenderal....Hal.2.

1. Desa merupakan entitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemanfaatannya sebagai objek pemberi manfaat bagi penduduk setempat.
2. Sebagai bagian dari masyarakat desa menunjukkan rasa memiliki dan memberikan dorongan kepada penduduk setempat untuk mengembangkan sumber daya lokal sebagai sumber pendapatan dan pandangan hidup masyarakat.
3. Desa memiliki kapasitas untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan lingkungan setempat seperti pangan, energi layanan dasar.
4. Masyarakat mampu mengembangkan peluang kerja yang memadai, sumber uang untuk ekosistem, dan pendapatan komunal awal sebagai tujuan jangka panjang.²²

2.1.2.4 Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Gagasan tata pemerintahan yang baik menurut Serdamayanti, secara konseptual mendefinisikan istilah “baik” dalam pengertian *Good governance* ini memiliki dua makna : pertama, nilai-nilai yang mendukung kemauan atau kehendak rakyat dan kedua nilai-nilai yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencapai tujuan kemandirian, keadilan sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dua aspek fungsional pemerintah melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut *Word Bank*, tata kelola yang baik adalah praktik manajemen pembangunan yang sehat dan akuntabel sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan pasar yang berfungsi sebagai penghindaran alokasi investasi yang tidak tepat dan pemberantasan korupsi baik ditingkat politik maupun administratif, implementasi prinsip-prinsip anggaran dan mengembangkan kerangka kerja untuk memperluas kegiatan komersial. *Good Governance* itu sendiri sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik

²² Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung : FOKUSMEDIA, 2015) h. 54

kemudian UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance* yaitu :

1. Partisipasi (*Participation*), yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi. Dijelaskan dalam Q.S Al- Imron : 159 *وشاورهم فى الامر* yang artinya *dan bermusyarahlah kamu dengan urusan mereka dalam urusan itu*. Dari dasar syuro ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa partisipasi masyarakat.
2. Transparansi (*Transparency*) yaitu transparansi yang dilandasi hak untuk mengakses informasi yang relevan bagi publik dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Berkeadilan (*Equity*) yaitu setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Dijelaskan dalam Q.S Almaidah ayat 8 *اعدلوا هو اقب للتقوى* yang artinya *berbuat adilah kamu (karena) berbuat adil lebih dekat kepada taqwa* dalam ayat ini dijelaskan bahwa tata kelola yang baik yaitu yang memberikan kesamaan akses terhadap warga masyarakat, terhadap sumberdaya, politik ekonomi, dan administratif.
4. Berorientasi consensus (*Consensus orientasi*), yaitu berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang lebih besar.
5. Efisien dan efektivitas (*Efectiveness and Effeciency*), setiap proses dan tindakan institusional memiliki tujuan penggunaan sumber daya yang tersedia sebesar mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar memuaskan kebutuhan.
6. Akuntabilitas (*Acountability*), yaitu pertanggung jawaban atas semua setiap tindakan yang dilakukan kepada publik.

7. Saling Keterbukaan (*Interrelated*) Keseluruhan ciri *Good Governace* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (*mutually reinforcing*) Tidak bisa berdiri sendiri.²³

2.1.2. Akuntabilitas

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Dalam penanganan dana desa, akuntabilitas merupakan kewajiban pembuat kebijakan kepada masyarakat untuk menilai akuntabilitas kebijakan pemerintah dalam memenuhi standar masyarakat. Akuntabilitas istilah bahasa Inggris, (*Accountability*) yaitu yang berarti "dapat dijelaskan" Akuntabilitas telah diamanahkan kepada entitas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala²⁴ Akuntabilitas mengukur tingkat kesesuaian pemberian layanan dengan ukuran nilai dan norma eksternal yang ada dimasyarakat, termasuk transparansi, keadilan sebagai sebuah konsep, jaminan penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan fokus pada pekerjaan masyarakat telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan desa berupaya meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah guna meningkatkan nilai dan standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Akuntabilitas menilai sejauh mana layanan sesuai dengan nilai dan norma eksternal yang ada dimasyarakat, termasuk transparansi, prinsip keadilan, perlindungan hukum, hak asasi manusia dan orientasi layanan yang dikembangkan terhadap masyarakat. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berupaya untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah guna

²³ Rofiatul Adawiyah, Skripsi: "*Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*" (Bogor: UNPAK, 2021),hal 8-9.

²¹ Wempy Banga. 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia

meningkatkan nilai dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.1.2.2 Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah keadaan dimana penyelenggara pemerintahan dapat mempertanggungjawabkan secara administratif dan politik kepada publik, baik untuk perencanaan politik, pelaksanaan dan pelaporan. Prinsip akuntabilitas adalah ukuran seberapa dekat layanan mematuhi nilai atau standar eksternal yang dipegang oleh mitra berkepentingan dengan layanan, sehingga berdasarkan tahapan program akuntabilitas, masing-masing adalah :

1. Dalam proses pengambilan keputusan, metrik akuntabilitas adalah :
 - 1) Semua keputusan harus di dokumentasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh seluruh warga Negara.
 - 2) Agar kuat dan mempertimbangkan nilai-nilai umum, pengambilan keputusan harus mematuhi standar administrasi yang sesuai.
 - 3) Tujuan politik tertentu yang sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan. Tujuan politik yang jelas, konsisten dengan visi dan misi yang ditetapkan.
 - 4) Konsistensi dan kelangsungan prioritas dan tujuan operasional yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.
2. Pada tahap sosialisasi indikator akuntabilitas
 - 1)Menyebarkan informasi tentang suatu keputusan melalui media massa, media massa dan media swasta.
 - 2)Keakuratan dan kelengkapan informasi tentang prosedur untuk mencapai tujuan program.
 - 3)Ketersediaan sitem informasi publik untuk mengelola dan mengkoordinasikan hasil-hasil pemerintah, atau akses terhadap informasi atau keputusan yang dibuat dengan mengajukan pengaduan.²⁵

²⁵ Dra. Loina Lalolo Krina, *"Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi Masyarakat Sekretariat Good Publik Governance"*. (Jakarta: Badan Pembangunan Nasional, 2003).

Asas tanggung jawab atau akuntabilitas merupakan konsep yang sudah tidak asing lagi dalam masyarakat muslim, dalam Islam konsep tanggung jawab dikaitkan dengan konsep amanah (*reliable*) orang yang disertai tugas menjalankan tugasnya di muka bumi, bukan pemegang kekuasaan manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai “khalifah” berupa kekuasaan dan wakil Allah SWT sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-An'am ayat 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ
الْعَاقِبِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ سَرِيعٌ

Artinya :

“Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa - penguasa dibumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk memujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu Sesungguhnya Rabb-Mu amat cepat sikasaan-Nya dan sesungguhnya dia Maha pengampun lagi Maha penyayang” (Q.S Al-an'am ayat 165).²⁶

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana menjadi seorang khalifah dan menekankan gagasan pertanggungjawaban dalam islam menggunakan istilah hisab atau perhitungan pada hari pembalasan dalam kaitanya dengan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab kepada Alloh SWT dalam segala hal yang berkaitan dengan manusia. Dalam kutipan hadits H.R Ahmad dan tirmidzi dijelaskan “ Tunaikan amanah kepada orang yang memberimu amanah dan janganlah kamu mengkhianati orang yang berkhianat terhadapmu”. Dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kita diberikan amanah yang harus dipertanggung jawabkan karena setiap apa yang kita kerjakan harus ada pertanggungjawabannya.²⁷

2.1.2.3 Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Menurut peraturan perundang-undangan nomor 06 tahun 2014 akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan serta kebijakan perundang-

²⁶ Rahmah Yulisa Kalbarini, 'Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syari'ah', *JEESTT*, VOL. 1. No 7 Juli 2014, Surabaya : Universitas Airlangga, h 507

²⁷ Ibid, Rahmah Yulisa Kalbarini...hal 507

undangan yang telah berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dana Desa,²⁸ tujuan utama dari akuntabilitas yaitu untuk mengetahui apakah kinerja yang dilakukan telah berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam Peraturan Pemerintah No 113 tahun 2014

dijelaskan bahwa terdapat lima tahapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa yaitu tahapan perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggung jawaban.

1. Perencanaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana Desa tahap perencanaan merupakan tahap yang penting karena dalam perencanaan tersebut akan terealisasikan program-program yang telah terstruktur sehingga dapat tersusun program apa saja yang akan dilaksanakan dan sumbernya berasal dari dana Desa.

2. Pelaksanaan Dana Desa

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap perencanaan, perencanaan yang telah disusun dan dimusyawarahkan dalam tahap perencanaan akan dilaksanakan pada tahap ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri no 113 tahun 2014.

3. Penatausahaan Dana Desa

Tahap penatausahaan merupakan aktivitas pertanggung jawaban dalam penerimaan pendapatan dana Desa dan pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran dana desa. Dalam pelaksanaan penatausahaan dana Desa, hal yang berkaitan dengan penatausahaan yaitu kaur keuangan sebagai fungsi dari kebendaharaan Desa wajib melakukan laporan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana Desa.

4. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban merupakan tahap terakhir dari bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana Desa, pada tahap ini pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa menyampaikan hal-

²⁸ Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa

hal yang berkaitan dengan hasil dari program yang telah diberlakukan dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk pertanggung jawaban.²⁹

2.1.2.4 Indikator Akuntabilitas

1. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa.
2. Partisipasi kepala desa dalam pengelolaan dana desa.
3. Adanya monitoring pelaksanaan serta adanya penyusunan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

2.1.2.5 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Menurut perspektif islam akuntabilitas dapat dilihat sebagai cara menggambarkan kewajiban seseorang kepada Alloh SWT sebagai khalifah dimuka bumi karena semua yang Alloh berikan kepada manusia akan dimintai pertanggungjwaban di akhirat.³⁰ Dalam Islam akuntabilitas dijelaskan dalam Q.S Al- Mudatsir : 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :“

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”³¹

Amanah hanya boleh diberikan kepada mereka yang berhak menerimanyadan mereka yang mendapatkannya harus adil dalam menyampaikan kebenaran agar tidak ada yang disembunyikan. Akuntabilitas harus diikuti dengan pengawasan yang efektif. Tanggung jawab adalah persepsi seseorang terhadap suatu prilaku atau tindakan yang disengaja atau tidak, tanggung jawab tersebut adalah sebuah perwujudan akan kesadaran dan kewajiban.

Dalam menjalankan kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan ayat

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa .

³⁰ Rifkayanti Amrullah, Skripsi : "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa". (Semarang: Universitas Islam Negeri Uin Walisongo Semarang, 2019). h 18.

³¹ Nafisah Ruhana, dkk. "Pengaruh Tanggung Jawab Pelaksanaan Fungsi Bisnis Sosial Terhadap Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syari'ah di Indonesia" Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Volume. 5 No 4 (2018) hal. 264

diatas adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan untuk menumbuhkan kepercayaan melaporkan, mensosialisasikan, dan memberitahukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Selain itu, merupakan bagian dari tugas ini untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pekerjaan suatu entitas yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan tersebut ditindaklanjuti.

2.1.3. Transparansi

2.1.3.1 Pengertian Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan kepada publik untuk mempertimbangkan hak-hak publik, transparansi diperlukan agar pemerintah dapat secara efektif mengelola sumber daya yang dipercayakan dan menegakan hukum dengan menyediakan informasi keuangan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³² Tranparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa yaitu mengacu pada praktik pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menyembunyikan dan merahasiakan pengeloaan keuangan dari masyarakat. Setiap orang berhak atas informasi berdasarkan dengan ketentuan undang-undang, prinsip transparansi ini sangat penting untuk memastikan bahwa keuangan desa menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dan mencegah konflik di masyarakat desa. keuangan desa dapat dikendalikan dan diawasi oleh aparat yang berwenang jika diterapkan transparansi karena menyangkut kegiatan masyarakat itu sendiri.

³² Lilis Saidah Napisah, 'Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi', *JRAK Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Volume 6 No (2020), 83.

2.1.3.2 Prinsip Transparansi

HFI (Forum Kemanusiaan Indonesia) telah mengklarifikasi prinsip transparansi.

1. Terdapat informasi yang dapat diperoleh dan dipahami oleh masyarakat umum, seperti pendanaan, metode pelaksanaan, dukungan dan format program.
2. Ada laporan berkala tentang proses aktivitas keuangan terperinci.
3. Kehadiran publikasi dan media tentang proses dan pedoman kegiatan dan rincian keuangan penyebarluasan informasi.³³

2.1.3.3 Tujuan Transparansi

Dalam mewujudkan dan mencapai tujuan, membangun kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan tujuan transparansi, dengan demikian pemerintah harus memberikan data penyesuaian, dimana pemerintah harus memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. dan sebagai pemangku kepentingan dan institusi yang dirasakan diantaranya menghindari penyimpangan melalui perhatian masyarakat dengan kontrol sosial, menghindari kesalahan dan mengkomunikasikan penegasan, mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, membangun dan memperkuat kepercayaan semua pihak dalam kegiatan.³⁴

2.1.3.4 Indikator Transparansi

1. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
2. Adanya keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban.

³³ Liong Tundunaung, 'Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tarang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud', *Jurnal Jurusan Pemerintahan*, Volume 1 No 4. (2018). Universitas Sam Ratulangi h, 4

³⁴ Fierdha Shafatunnisa, Skripsi : "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders Di SD Islam Binakheir" (Jakarta : UIN SYARIF HIDAYATULLAH. 2015), Hal. 28

2.1.3.5 Transparansi Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam tablig merupakan bentuk transparansi yaitu dapat mengungkapkan segala sesuatu dengan jelas secara terbuka sesuai dengan fakta, selalu didasari dengan kejujuran dalam berbicara, dalam segala sesuatu yang telah direncanakan dan yang akan dilaksanakan. Dalam transparansi pemberdayaan pengelolaan keuangan desa jika dihindari ini merupakan kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada Allah SWT. Dengan itu transparansi merupakan suatu hal yang penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan dapat menyelamatkan keuangan masyarakat karena dengan adanya transparansi pemegang kekuasaan harus mencerminkan sikap terbuka. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-nahl 101 sebagai berikut :

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya

“Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata “Sesungguhnya (Muhammad) hanyalah mengada-ngada saja.”Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.³⁵

Maksud dari kandungan ayat tersebut bahwa seorang pemimpin harus menyajikan sebuah informasi yang sesuai dengan fakta tidak mengurangi atau melebih-lebihkan agar masyarakat tidak merasa dibohongi.

2.1.4. Partisipasi Masyarakat

2.1.4.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah peran ikut serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga mempengaruhi proses evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan serta pengurangan kasus korupsi. Partisipasi masyarakat adalah salah satu cara untuk meningkatkan tanggung jawab dalam menghadapi keraguan masyarakat terhadap lembaga pemerintah mulai dari penilaian awal hingga pelaporan.³⁶

Partisipasi masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa

³⁵ Rifkayanti Amrullah, Skripsi : "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa". (Semarang: Universitas Islam Negeri Uin Walisongo Semarang, 2019). h 46.

³⁶ Ibid, Supami Wahyu Sulisty... Hal. 4.

partisipasi masyarakat tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat, prinsip partisipasi masyarakat mendorong setiap orang untuk menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat dalam proses yang berdampak pada kepentingan masyarakat, untuk mengambil keputusan yang bijak tentang keuangan desa, desa harus melibatkan masyarakat dalam berbagai proses dan tahapan pengambilan keputusan, termasuk hak setiap masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam berbagai tahapan pemberdayaan masyarakat.³⁷

2.1.4.2 Tahapan Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen & Naimah tahapan partisipasi masyarakat dibagi kedalam beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap pengambilan Keputusan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap menikmati hasil
4. Tahap Evaluasi³⁸

2.1.4.3 Unsur-unsur Partisipasi Masyarakat

1. Keikutsertaan dan keterlibatan
2. Kesadaran secara sukarela
3. Adanya sikap pro aktif
4. Adanya kontribusi yang diberikan baik dari sisi fisik maupun non fisik
5. Adanya kesepakatan - kesepakatan³⁹

³⁷ Siti Susanti Rahmah, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa', *JOM FEB*, Volume 6 (2019).

³⁸ Ibid, Siti Umaira... Hal. 473.

³⁹ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Pers 2014, Hal. 144

2.1.4.4 Manfaat Adanya Penerapan Partisipasi Masyarakat

Berikut beberapa manfaat penting adanya partisipasi masyarakat yaitu :

1. Keterlibatan masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan kebijakan yang krusial, seperti perencanaan dan penganggaran.
2. Partisipasi masyarakat dapat menghasilkan strategi dalam program yang dilaksanakan dengan cara inventif dan kreatif.
3. Partisipasi aktif kelompok marjinal berpotensi berkembang menjadi alat ukur untuk mengembangkan inisiatif pengganti dan menghapus hukum yang diskriminatif.
4. Partisipasi masyarakat menjadi alat komunikasi yang kuat sehingga suatu konflik cenderung tidak akan terjadi jika forum diskusi dikelola dengan baik.⁴⁰

2.1.4.5 Indikator untuk Mengukur Partisipasi Masyarakat

1. Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
2. Adanya partisipasi masyarakat dalam pemantauan, evaluasi hasil, serta penerimaan dan pemanfaatan hasil.

2.1.4.6 Partisipasi Masyarakat Perspektif Islam

Tujuan utama dari partisipasi masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat membangun kepercayaan sehingga masyarakat dapat menerima keputusan dan menggunakan sistem yang ada saat menghadapi tantangan, suara masyarakat disalurkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dengan mendorong masyarakat agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam Alqur'an partisipasi masyarakat dijelaskan dalam Q.S Almujaadalah 58:11 yang berbunyi :

⁴⁰ Ibid. Moch Solekhan ... Hal. 144

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu “ berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “ Berdirilah kamu” maka niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁴¹

Salah satu kriteria keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan desa adalah adanya keterlibatan masyarakat, dalam pengelolaan pembangunan dana desa penting adanya masyarakat yang memiliki kemampuan dan keinginan dalam mengelola sumber daya alam yang baik untuk membangun desa mereka sendiri dan untuk memaksimalkan sumber daya alam yang baik. Dalam ayat diatas kita diperintahkan untuk saling meringankan dan bekerja sama untuk kebaikan yang lebih baik tanpa ada rasa ingin mendapatkan imbalan karena Allah mengetahui apa yang kita perbuat dan akan membalasnya.

2.1.5. Pemberdayaan Masyarakat

2.1.5.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut peraturan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (12) pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemandirian melalui peningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya dengan menyiapkan kebijakan, program, kegiatan, dan bantuan yang sesuai dengan inti permasalahan dan kebutuhan utama masyarakat Desa.⁴² Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk upaya sekelompok orang atau masyarakat untuk lebih berdaya agar masyarakat mampu mengurus kepentingannya dengan mandiri, pemerintah terus berusaha mengupayakan pemberdayaan masyarakat demi tercapainya kemandirian masyarakat terutama dalam

⁴¹ Rahmat Hidayat, dan Candra Wijaya, *Ayat-ayat Alqur-an tentang Manajemen Pendidikan Islam*, Medan LPPI, 2017. Hal 18-19

⁴² Undang-Undang Dasar No 6 Tentang Desa

pembangunan desa. Dalam upaya memandirikan masyarakat serta mengembangkan potensi-potensi yang ada masyarakat tidak hanya menerima hasil akan tetapi ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemandirian tersebut.

2.1.5.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai suatu bentuk kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, Perkembangan masyarakat yang sejatara sangat dipengaruhi dengan adanya pemberdayaan, karena pemberdayaan merupakan suatu metode yang umum digunakan dan dikembangkan dimana pemberdayaan harus bersikap individu dalam proses pertumbuhan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga hal utama yaitu sebagai berikut :

1. Dapat menghasilkan suasana atau iklim yang mendorong potensi masyarakat (*enabling*)
2. Meningkatkan kekuatan atau potensi masyarakat (*empowering*)
3. Memberdayakan atau melindungi dalam proses pemberdayaan, yang lemah harus dicegah agar tidak menjadi lebih lemah, karena mereka kurang berdaya untuk menghadapi yang kuat.

Oleh karena itu, gagasan pemberdayaan masyarakat mendasarkan perlindungan dan dukungan pada kelemahan yang melekat pada individu tersebut. Adanya pemberdayan masyarakat tidak meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap berbagai program karena pada umumnya segala sesuatu yang dinikmati harus diciptakan oleh mereka sendiri sehingga hasilnya dapat dipertukarkan dengan bagian lain, dengan demikian adanya Undang-undang yang jelas dan tegas melindungi yang lemah sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan.

2.1.5.3 Maksud dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Maksud dan tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Membantu terciptanya komunitas yang otentik dan kohesif kelompok yang lemah, rentan, miskin, terpinggirkan dan kecil.
2. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial dan ekonomi agar lebih mandiri dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sehingga dapat tercapainya sebuah tujuan.⁴³

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah memihak, mempersiapkan, dan melindungi masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkualitas untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik guna mewujudkan kesejahteraan. Masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu menghasilkan produk dan mendapatkan manfaat dari hasil produksinya.

2.1.5.4 Upaya untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya yang dilakukan untuk mencapai pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Mengembangkan komitmen untuk meminta bantuan pihak-pihak terkait dalam masalah kebijakan, masyarakat, dan pendanaan.
2. Meningkatkan semangat aktivitas masyarakat.
3. Memperbaiki kerangka operasional fasilitator.
4. Mengaktifkan serta menggunakan kemampuan sumber daya masyarakat.⁴⁴

2.1.5.5 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

1. Kemampuan.
2. Kepercayaan.
3. Wewenang dan tanggung jawab.

2.1.5.6 Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam pandangan islam karena menganut paradigma yang berbeda yang bersifat holistik dan strategis. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat islami mengajarkan masyarakat bagaimana mengambil

⁴³ Meidylisa Patty, 'Akuntabilitas Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa', *Jurnal Ekonomi Sosial & Humaniora*, Vol. 01 No 9 (2020).

⁴⁴ Totok Mardianto, dan Poerwoko Soebianto, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik", Bandung : Alfabeta, 2015 hal 226.

tindakan mandiri untuk meningkatkan taraf hidup dengan cara berkontribusi pada kesejahteraan dan keselamatan dunia yang akan datang.

Salah satu alasan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam karena pemberdayaan masyarakat dapat menghasilkan pertumbuhan yang langgeng yang berkelanjutan, yang akan mengarah pada peningkatan standar hidup yang berkelanjutan. Konsep pemberdayaan masyarakat dijelaskan dalam alqur'an Q.S Ar-Ra'du yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ
وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.”⁴⁵

Berdasarkan ayat diatas menyebutkan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubahnya, dan manusia diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensi dan bekerja keras untuk mengubah nasib mereka sendiri. Sesuai dengan pemberdayaan masyarakat yang mana masyarakat dapat mengelola urusan mereka sendiri dan mengendalikan sumber daya mereka sendiri agar masyarakat dapat mengembangkan eksplorasi bakat, kreativitas, kompetensi dan daya pikir individu yang dapat merubah kehidupan mereka dengan bakat dan keahlian yang mereka miliki sebagai hasil dari kemampuan mengelola sumber daya.

2.2. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis	Judul	Hasil
1	Vitri Nur Indarti 2018	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Gunul,	Hasil Dari Penelitian menunjukan bahwa tranparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif baik secara parsial atau simultan karena

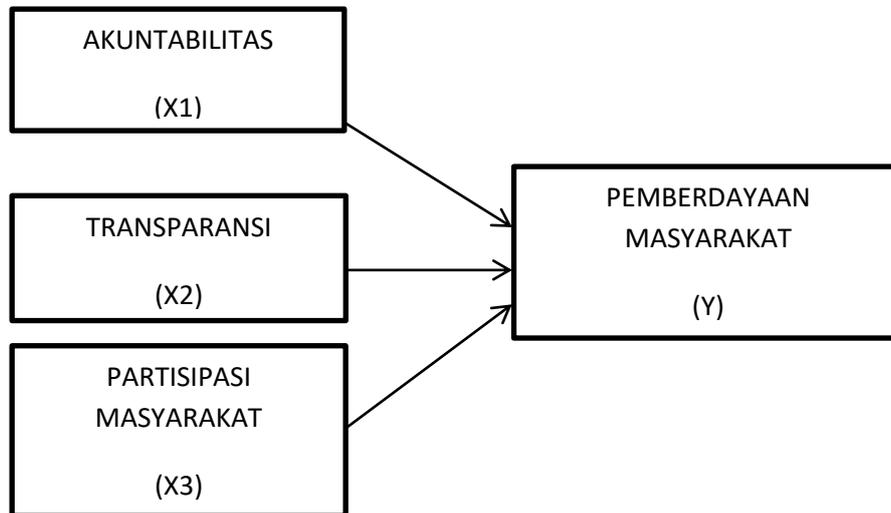
⁴⁵ Marekan, Teguh Anshori “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” Vol 1 No 2, *Journal Of Community and Disaster Management*, 2019, Hal 121.

NO	Nama Penulis	Judul	Hasil
		Kecamatan Kerangnongko, Kabupaten Klaten.	dengan adanya prinsip tranparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2	Supami Wahyu Sulistyو 2019	Pengaruh Transparansi,Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memberikan Dampak positif bagi pembangunan desa.
3	Matia Andriani 2018	Pengaruh Transparansi,akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan dana Desa (Desa Luk Kecamatan Ree)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa dana Desa
4	Ridwan Indra Hermawan, Yulita Zannaria, Neldi Hendri 2021	Pengaruh akuntabilitas Transparansi, dan partisipasi masyarakat Terhadap Efektivitas Alokasi Pengelolaan Dana Desa (Di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Sumber di Kumpulkan Dari Peneliti Terdahulu

2.3. Kerangka Teori

Kerangka Teori berdasarkan tinjauan pustaka penelitian ini yaitu :



2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau asumsi mendasar merupakan jawaban sementara atas suatu masalah yang masih dipertimbangkan karena belum dapat dipastikan kebenarannya, Jawaban hipotetis adalah fakta sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah:

2.8.1 Pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas ialah wujud pertanggung jawaban pemerintah desa yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan desa supaya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat karena pada dasarnya penggunaan keuangan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa akan menjadi lebih berhasil dan lebih baik apabila menerapkan prinsip akuntabilitas yang baik. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supami Wahyu Sulisty (2019) hasil penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas dapat membantu dalam menunjang pembangunan desa dan dengan adanya akuntabilitas dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sehingga akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap pembangunan desa. Oleh karena itu, hipotesis berikut dapat diajukan:

H1 Akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki pengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

2.8.2 Pengaruh transparansi dalam pengelolaan dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

Agar masyarakat berfungsi secara efektif, pemerintah harus transparan. mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada publik dan menegakan hukum dengan memberikan informasi keuangan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena masyarakat umum memiliki hak atas pengungkapan semua fakta secara penuh dan transparan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa mengacu pada pengelolaan dana desa yang merupakan rangkaian kegiatan lengkap yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai peserta dalam penggunaan dana desa.⁴⁶ Dalam pengelolaan keuangan dana desa jika di dalamnya menganut asas keterbukaan yang benar maka akan berjalan menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vitri Nur Indarti (2018) yaitu dengan judul pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.⁴⁷ Berdasarkan uraian di atas, asumsi berikut dapat dirumuskan:

H2 Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

2.8.3 Pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat

⁴⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁴⁷ Vitri Nur Indarti, Skripsi : *"Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat"*. (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana Yogyakarta, (2018). h 17

Partisipasi masyarakat yaitu masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada semua tahapan pembangunan termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan perlindungan lingkungan.⁴⁸ Dalam Pemberdayaan sumber daya masyarakat, desa menerapkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa karena dalam setiap tindakan membutuhkan masukan dari masyarakat, keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan maupun penyampaian pendapat dalam pemerintahan, Hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suwari Wirna, dkk (2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H3 partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

⁴⁸ Mirna Indriani, dkk., Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, "Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar" Vol. 7 No. 1 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini yaitu mengenai tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, Lokasi penelitian di lakukan di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data berupa angka-angka. Penelitian kuantitatif menguji suatu hipotesis atau teori tertentu dengan mengukur variabel sebagai objek penelitian.

3.3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah umum (kelompok) yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang diidentifikasi oleh peneliti untuk penelitian dan penarikan kesimpulan sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah atau karakteristik populasi tertentu.⁴⁹ Populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan yang telah berusia 17 tahun atau telah cakap hukum. Penentuan pengambilan sample yaitu menggunakan teknik purposive sampling Menurut Ferdinand dalam menentukan jumlah sampel yang refresentatif adalah tergantung pada jumlah indikator dikali 5⁵⁰. Jumlah Sampel minimum pada penelitian ini adalah

Sampel Minimum = Jumlah Indikator x 5

$$= 10 \times 5$$

$$= 50 \text{ responden}$$

⁴⁹ Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta

⁵⁰ Augusty Ferdinand. (2014) *Metode Penelitian Manajemen (5 ed)*. Jawa Tengah : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Berdasarkan acuan pendapat tersebut dan berdasarkan pertimbangan yang telah di kemukakan, sehingga peneliti mengambil 50 sampel pada penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, penyebaran kuesioner secara langsung disebar kepada masyarakat yang telah cakap hukum, pada kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat telah terdapat beberapa pertanyaan dan pernyataan yang telah disajikan oleh peneliti dengan harapan agar responden dapat menjawab pertanyaan dan pernyataan tersebut. Sebelum kuesioner diberikan kepada responden peneliti menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan dari penyebaran kuesioner tersebut kemudian kuesioner diberikan kepada responden, pada proses pengisian kuesioner peneliti menjelaskan poin-poin pertanyaan atau pernyataan tersebut apabila ada responden yang belum memahami pertanyaan atau pernyataan tersebut. Untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rincian sebagai berikut :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat setuju (SS)

3.5. Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Definisi Variabel Penelitian

Variabel adalah segala bentuk yang telah ditetapkan oleh peneliti yang digunakan untuk mengumpulkan informasi variabel tersebut untuk diambil kesimpulannya. Variabel penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Variabel independen dan
- b. Variabel dependen

Variabel independen adalah variabel yang sering disebut variabel bebas atau variabel tidak terikat yaitu variabel yang mempengaruhi baik penyebab maupun perubahan variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat akibat adanya variabel bebas. Dari definisi di atas, dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas atau independent adalah variabel (X) dalam judul penelitian yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, dan variabel terikat (Y) adalah pemberdayaan masyarakat.

3.5.2 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

No	VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR
1	Akuntabilitas	Akuntabilitas adalah kewajiban untuk melaporkan kemampuan usaha individu, badan hukum, dan pimpinan organisasi kepada entitas dalam rangka mencapai tujuannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa. - Partisipasi kepala desa dalam pengelolaan dana desa. - Adanya monitoring pelaksanaan serta adanya penyusunan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa.
2	Transparansi	Transparansi ialah sesuatu proses keterbukaan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Musyawarah yang melibatkan masyarakat - Keterbukaan dalam perencanaan,

No	VARIABEL	DEFINISI OPER ASIONAL	INDIKATOR
		menerima informasi secara akurat tidak diskriminatif tentang penerapan program organisasi yang mengutamakan proteksi rahasia individu, kelompok, serta negeri .	pelaksanaan, serta pertanggungjawaban.
3	Partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses mengenali masalah dan potensi sosial, dan memberikan solusi yang kreatif untuk menghadapi suatu permasalahan yang ada dan keikutsertaan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. - partisipasi masyarakat dalam pemantauan, evaluasi hasil, serta penerimaan dan pemanfaatan hasil.
4	Pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat merupakan program untuk membangun dan mewujudkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan harkat	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan - Kepercayaan - Wewenang dan Tanggung Jawab

No	VARIABEL	DEFINISI OPER ASIONAL	INDIKATOR
		dan kedudukan masyarakat.	

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Kelayakan Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner, kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner cenderung mengungkapkan informasi yang dapat diukur dengan jumlah kuesioner.⁵¹ Dalam uji validitas peneliti menggunakan korelasi *Bivariate pearson*. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien Korelasi

n : Jumlah Responden / Sample

X : Skor Butir

Y : Skor Total

Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas yaitu membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan tingkat signifikan 5% apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka hasil tersebut dikatakan valid.

⁵¹ Budi Darma. 2021 "Statistika Penelitian Menggunakan SPSS". JAKARTA: GUEPEDIA. (Dikunjungi Pada 21 Agustus 2021) dihalaman <https://books.google.co.id/books?id=acpLEAAQBAJ&lp_g=PA41&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji untuk mengukur kuesioner sebagai indikator perubahan atau konstruksi. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau dapat dipercaya jika tanggapan seseorang terhadap suatu pertanyaan tetap konstan atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dalam penelitian ini adalah uji reliabilitas *Cronbach Alpha* dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \hat{a}_b^2}{\hat{a}_t^2} \right)$$

Keterangan :

r_{11} : Reabilitas Instrumen

k : Banyaknya item pernyataan atau pertanyaan

$\sum \hat{a}_b^2$: Jumlah Varians Butir

\hat{a}_t^2 : Varians Total

Kuesioner dapat dikatakan reliable jika nilai *Cronbach Alpha* > dari 0,6.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model dengan nilai residual yang terdistribusi normal. Oleh karena itu, uji normalitas tidak dilakukan pada setiap variabel, melainkan pada nilai residual. Dalam tes normatif, peneliti akan mengambil tes Kolmogorov Smirnov. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas menggunakan tingkat α sebesar 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal.

2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.⁵²

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara faktor-faktor independen suatu model regresi linier berganda. Jika terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel yang bebas dengan variabel yang terikat masih terganggu.

Dasar pengambilan keputusan multikolinearitas dengan dua cara, yakni:

1. Melihat nilai *tolerance*:
 - 1) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas.
 - 2) Jika nilai *tolerance* $< 0,10$, maka artinya terjadi multikolinearitas.
2. Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)
 - 1) Jika nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas.
 - 2) Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.⁵³

3.6.2.3 Uji Heterokdastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dan residual dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam uji heteroskedastisitas peneliti menggunakan tingkat α sebesar 0,05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Jika sign. $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika sign. $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.⁵⁴

⁵² Duli, Nikolous. 2019 Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Penulisan Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS Edisi Pertama. Sleman: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA. (Dikunjungi pada 23 Agustus 2021 dihalaman <https://books.google.co.id/books?id=A6fRDwAAQBAJ&pg=PA114&dq=Asumsi+klasik&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiFuizyoPtAhUaWXOKHRrRA6QQ6AEwAXoECAMQAg%20-%20v=onepage&q=Asumsi%20klasik&f=false>)

⁵³ Ibid, Duli, Nikolous...hal 75-84

⁵⁴ Ibid, Duli, Nikolous...hal 85

3.6.3 Uji Hipotesis

3.6.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah metode statistis yang bertujuan untuk menemukan korelasi antara variabel terikat (*dependen*) dengan lebih dari satu variabel bebas (*independen*) Artinya dalam metode ini variabel terikat (Y) tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas (X) saja. Adapun rumus regresi linier berganda adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

\hat{Y} : Variabel dependen (nilai yang diprediksikan).

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien regresi variabel $X_1 - X_3$

X_1 : Akuntabilitas

X_2 : Transpransi

X_3 : Partisipasi Masyarakat

e : Standard Error⁵⁵

3.6.3.2 Uji Parsial (*t-test*)

Uji parsial biasanya digunakan untuk mengetahui pengaruh antara masing-masing variabel independen (X) memengaruhi variabel dependen (Y). Tahapan dalam uji parsial (t-test) yaitu: Perumusan hipotesis, penentuan nilai kritis. Nilai kritis dalam pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi dapat ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal (t tabel) dengan mempertimbangkan tingkat signifikan (α 5%) dan

⁵⁵ Rohmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS* Edisi Ketiga. Ponorogo: CV. WADE GROUP. (Dikunjungi pada 28 Agustus 2021) di halaman [<https://books.google.co.id/books?id=MQCGDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false%0A%0A>](https://books.google.co.id/books?id=MQCGDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false%0A%0A).

jumlah sampel yang digunakan, dengan ketentuan degree of freedom (df)= $n-k=k$. Menghitung nilai t hitung masing-masing nilai koefisien regresi, pengambilan keputusan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila t hitung $>$ t tabel maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila t hitung $<$ t tabel maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.⁵⁶ Kesimpulan, pada tahap ini keputusan menyatakan apakah menolak H_0 dan menerima H_a ataupun sebaliknya.

3.6.3.3 Uji Simultan (*f-test*)

Uji simultan merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersamaan atau tidak. Langkah-langkah dalam uji simultan (*F-test*) sebagai berikut:

1. Perumusan hipotesis.
2. Menentukan nilai kritis distribusi F (F Tabel) dengan tingkat signifikan (α) dan *degree of freedom* (df). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tingkat signifikan (α) sebesar 0,005 atau 5%.
3. Menghitung nilai F Hitung.

Pengambilan keputusan, dengan cara membandingkan nilai F Hitung dengan nilai F_{tabel} .

1. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kesimpulan, pada tahap ini keputusan menyatakan apakah menolak H_0 dan menerima H_a ataupun sebaliknya.⁵⁷

⁵⁶ Ibid, Budi Darma...hal 44

⁵⁷ Ibid, Budi Darma...hal 48

3.6.3.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji sejauh mana model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien variasi antara nol sampai dengan satu. Jika nilai R^2 nol maka kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen terbatas. Sedangkan jika nilai R^2 mendekati satu berarti hampir memberikan segala informasi yang sedang dibutuhkan dalam memprediksi adanya variabel dependen.⁵⁸

⁵⁸ Ibid, Budi Darma...

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kelurahan Tambakaji

4.1.1 Sejarah Kelurahan Tambakaji

Kelurahan tambakaji yaitu salah satu kelurahan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, awal mulanya sekitar abad ke 19 kurang lebih tahun 1931 Masehi (jaman pemerintahan Ratu Hermina), terdapat satu sandang dimana sandang tersebut airnya melimpah ruah dan airnya bisa mengairi hingga Dukuh Garut, Dukuh Dondong, Dukuh Karanganyar, Dan Dukuh Ngebrug. Buat menjaga kelestarian sendang tersebut masyarakat mengadakan tradisi sedekah dengan menyembelih wedus kendit lanag dilamari godhong plosu dan saat menyembelih darahnya langsung ditempatkan dalam empat takir kemudian diletakan dipojok- pojok sendang, dan daging wedus kendit tidak boleh dimakan hanya boleh dicicipi disertai dengan do'a-do'a dengan tujuan menolak bencana agar air sandang bisa terus melimpah ruah, dari air sendang yang melimpah ruah kemudian warga bergotong royong membuat tambak-tambak satu persatu hingga menjadi empat. sebab limpahan ruahnya air sandang tersebut para ulama dan warga aji-aji sedang tersebut bersepakat jika terdapat kampung di daerah itu akan dinamakan kampung “**Tambakaji**” Adapun Kelurahan Tambakaji berdiri pada tahun 1992 berasal dari penataan wilayah di kotamadya Semarang yang diatur pada peraturan pemerintah (PP) 50 tahun 1992 yang dulu yaitu kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu sekarang menjadi Kelurahan Tambakaji nama kelurahan tadi diambil berasal dari sejarah Tambakaji.⁵⁹

Kelurahan Tambakaji terletak di Jalan Raya Walisongo KM 8 Semarang dengan luas wilayah 383.043 km² Jumlah penduduk kelurahan Tambakaji yaitu sebanyak 20.782 jiwa terdiri dari 10.368 jiwa penduduk laki- laki dan 10.414 jiwa penduduk perempuan dan terdiri dari 6.578 KK,

⁵⁹ Rojikan, Supaat. [https : tambakaji.semarangkota. go.id/profilkelurahan/ asalusulkelurahantambakaji](https://tambakaji.semarangkota.go.id/profilkelurahan/asalusulkelurahantambakaji) 05 Juni 2019 di Akses pada tanggal 2 Agustus 2022

16 RW dan 121 RT. Kelurahan Tambakaji memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara Kecamatan Tugu
- Sebelah selatan Gondoriyo, Kelurahan Bringin,
- Sebelah Timur Kelurahan Purwoyoso.⁶⁰

4.1.2 Visi dan Misi Kelurahan Tambakaji

Program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan harus menghantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa. Adapun Visi dan Misi Kelurahan Tambakaji yaitu sebagai berikut :

4.1.2.1 Visi

“Terwujudnya Aparatur Kelurahan Tambakaji yang mumpuni untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan kecil menuju masyarakat sejahtera”

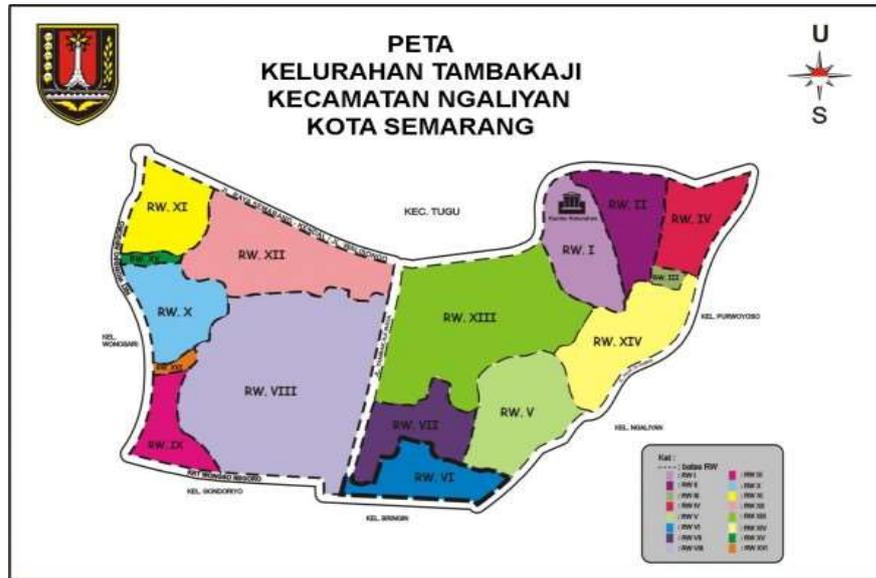
4.1.2.2 Misi

1. Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara tepat bersih dan berwibawa.
2. Mewujudkan pemerintahan kelurahan secara efektif dan efisien.
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur wilayah kelurahan yang tertata dan ramah lingkungan.
4. Mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif.
5. Menjunjung tinggi azaz musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan dan kebersamaan dengan prinsip taat azaz aturan yang berlaku.⁶¹

⁶⁰ <https://tambakaji.semarangkota.go.id/letakgeografisdanpendudukkelurahantmbakaji>
Di Akses pada tanggal 02 Agustus 2022

⁶¹ <https://tambakaji.semarangkota.go.id/visikelurahantambakaji> Di Akses pada tanggal 02 Agustus 2022

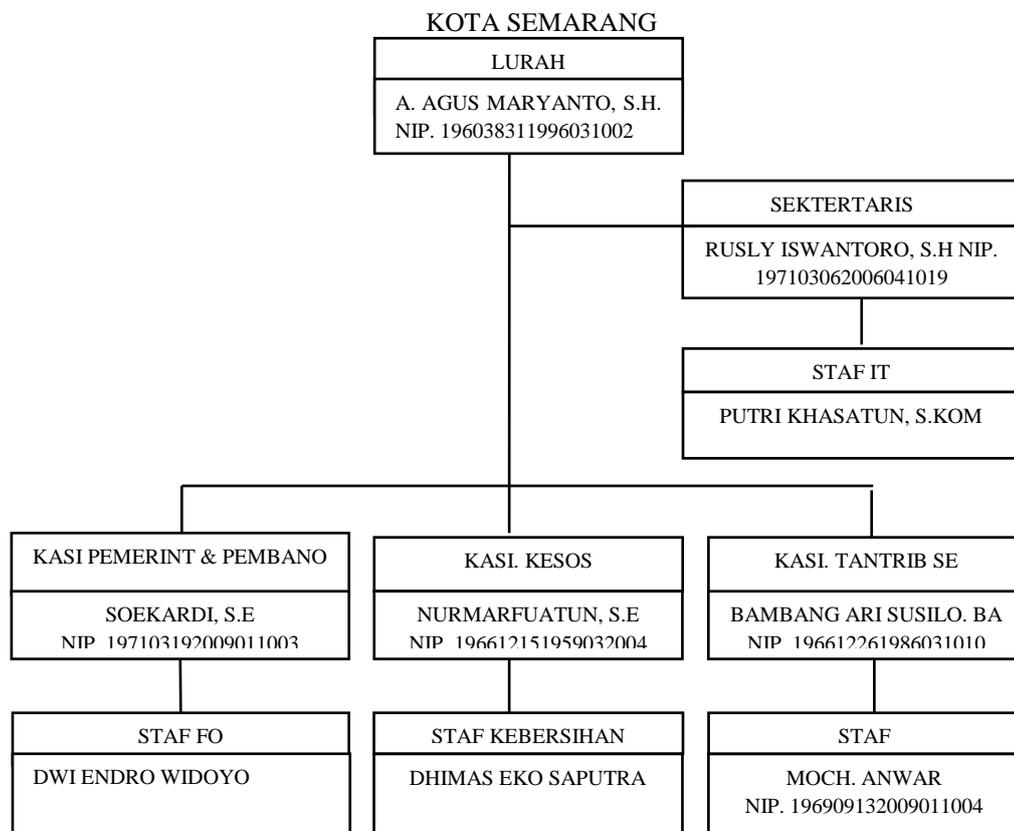
4.1.3 Peta Kelurahan Tambakaji



Sumber: tambakaji.semarangkota.go.id

4.1.4 Struktur Kelurahan Tambakaji

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN TAMBAKAJI KECAMATAN NGALIYAN



Sumber: tambakaji.semarangkota.go.id

4.2. Deskriptif Data

4.2.1 Karakteristik Responden

Data yang yang diperoleh dari penelitian yaitu data yang dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner, penyebaran kuesioner dilakukan dengan memberikan secara langsung kepada responden untuk mengisi kuesionernya, kuesioner dapat di isi oleh masyarakat yang telah berusia 17 tahun atau telah cakap hukum, untuk mendapatkan responden peneliti secara turun kelapangan untuk bertemu dengan responden yang bersedia untuk mengisi kuesioner tersebut. Penyebaran Kuesioner dilakukan dari tanggal 04 sampai dengan 12 Desember 2021 kemudian dilakukan penyebaran ulang terhadap beberapa responden dengan tujuan untuk memperbaiki jawaban dari responden dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Mei 2022, responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 50 responden.

4.2.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah(orang)	Persentase
Laki-laki	26	52%
Perempuan	24	48%
Jumlah	50	100%

Berdasarkan Karakteristik jenis kelamin, jumlah responden pada penelitian ini yaitu laki-laki sebanyak 26 orang, perempuan 24 orang dengan jumlah keseluruhan responden yaitu sebanyak 50 orang.

4.2.3 Karakteristik Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase (%)
17-25	8	16%
26-30	9	18%
31-40	12	24%
41-50	14	28%
> 50	7	14%
Jumlah	50	100%

Berdasarkan tabel Karakteristik usia dapat dilihat bahwa responden yang berusia 17-25 tahun sebanyak 8 orang jumlah persentase yaitu 16%,

responden yang berusia 26-30 berjumlah 9 orang (18%), responden berusia 31-40 berjumlah 12 orang (24%), responden yang berusia 41-50 berjumlah 14 orang (28%) dan responden yang berusia 50 tahun atau lebih berjumlah 7 orang (14%).

4.2.4 Karakteristi Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Karyawan Swasta	15	30%
PNS	0	0%
Wiraswasta	10	20%
Pedagang	7	14%
Nelayan	0	0%
Petani	0	0%
Lainya	13	26%
Tidak Bekerja	5	10%
Jumlah	50	100%

Berdasarkan tabel tersebut jumlah responden yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 15 orang (30%), jumlah responden Wiraswasta 10 orang (20%), jumlah responden yang bekerja sebagai pedagang 7 orang (14%), jumlah responden yang tidak bekerja 5 orang (10) dan Lainnya sebanyak 13 orang 26% sedangkan tidak ada responden yang berkreteria kerja sebagai PNS, Petani, dan Nelayan.

4.3. Uji Kelayakan Data

4.3.1 Uji Validitas

Dalam uji validitas data pada setiap pernyataan dikatakan valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} cara mengetahui r_{tabel} yaitu $df = n-2$ pada signifikan 5% pada distribusi nilai r_{tabel} sesuai dengan penelitian ini nilai $df = 50-2 = 48$ nilai r_{tabel} bisa dilihat pada kolom $df = (N-2)$ dengan nilai 48 dengan tingkat signifikan 0,005 atau 5% sehingga dapat diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,2787. Hasil uji Validitas dalam aplikasi SPSS dapat dilihat sebagai berikut

Variabel	Item Pernyataan	Pearson Correlation	R _{tabel}
Akuntabilitas	X1.1	0,746	0,2787
	X1.2	0,634	0,2787
	X1.3	0,808	0,2787
	X1.4	0,482	0,2787
Transparansi	X2.1	0,637	0,2787
	X2.2	0,783	0,2787
	X2.3	0,839	0,2787
	X2.4	0,893	0,2787
Partisipasi Masyarakat	X3.1	0,699	0,2787
	X3.2	0,821	0,2787
	X3.3	0,748	0,2787
	X3.4	0,720	0,2787
Pemberdayaan Masyarakat	Y1	0,452	0,2787
	Y2	0,657	0,2787
	Y3	0,812	0,2787
	Y4	0,689	0,2787
	Y5	0,531	0,2787
	Y6	0,433	0,2787
	Y7	0,556	0,2787
	Y8	0,712	0,2787

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Correlation* lebih besar dari nilai R_{tabel} sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan pada setiap variabel dikatakan valid karena memiliki nilai lebih besar dari nilai R_{tabel} yaitu 0,2787

4.3.2 Uji Reliabilitas

Kuesioner di uji reliabilitasnya yaitu sebagai alat untuk menilai konstruksi atau perubahan, Jika tanggapan seseorang terhadap suatu pertanyaan tetap konstan atau stabil dari waktu ke waktu maka kuesioner tersebut dapat dipercaya dan dapat digunakan. Untuk mengukur uji reliabilitas menggunakan aplikasi spss instrument dikatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha* memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Reliability Statistics

(Variabel X)

Cronbach's Alpha	N of Items
0.845	12

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Reliability Statistics

(Variabel Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
0.745	8

Dari hasil uji Reliabilitas dapat dilihat bahwa : nilai *Cronbach Alpha* pada variabel X yaitu 0,845 dan nilai *Cronbach Alpha* pada Variabel Y yaitu 0,745 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap items pertanyaan pada variabel X dan Y dapat dikatakan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga data dapat digunakan untuk pengujian analisis berikutnya.

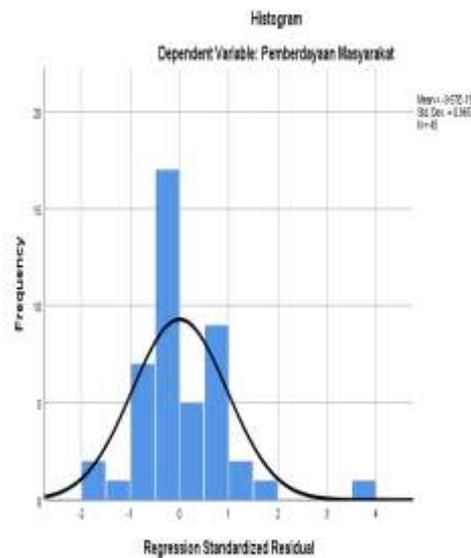
4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak, untuk melakukan uji analisis selanjutnya nilai residual harus berdistribusi normal agar uji selanjutnya valid, untuk

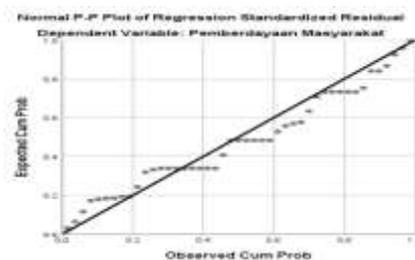
uji normalitas pada penelitian ini menggunakan analisis grafik Histogram, dan uji P-P Plot untuk memperkuat tingkat kevalidan uji normalitas ini menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*. Berikut adalah hasil uji normalitas :

Grafik Histogram Uji Normalitas



Sumber : *data Primer diolah 2022*

Pada Grafik tersebut dapat dilihat bahwa data tersebut menyebar digaris diagonal atau grafik histogramnya sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena garis tersebut menyebar mengikuti grafiknya tidak condong kearah kanan maupun kiri. Selain melihat grafik histogram uji normalitas bisa dilihat menggunakan grafik P-P Plot pada grafik dibawah ini.



Sumber : *data Primer diolah 2022*

Pada Grafik tersebut dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal, hal ini dapat dilihat dari sebaran data residual data tersebut menyebar mengikuti garis lurus, apabila data tidak berdistribusi normal

data tersebut akan menyebar secara acak. Untuk uji normalitas dapat dilihat juga dengan menggunakan uji *Kolmogorov - Smirnov* dibawah ini

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.93165193
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.118
	Negative	-.097
Test Statistic		.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.136 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : *data Primer diolah 2022*

Berdasarkan Hasil pengujian One Sample *Kolmogorov- Smirnov* nilai residual pada data tersebut berdistribusi normal, hasil uji memiliki nilai signifikan 0,136 nilai tersebut > dari 0,05 sehingga data tersebut berdistribusi normal. Untuk menormalkan data pada uji ini dilakukan Outlier data karena terdapat beberapa data ekstrim yaitu data jawaban responden pada nomor 12, 18 39,40 dan 48 sehingga jumlah N pada penelitian ini berjumlah 45 orang, berikut adalah hasil uji one sample Kolmogorov Smirnov sebelum dilakukan outlier data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.76365676
Most Extreme Differences	Absolute	.192
	Positive	.090
	Negative	-.192
Test Statistic		.192
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan nilai signifikan yaitu 0,000 kurang dari 0,05 sehingga data tersebut tidak berdistribusi normal untuk menormalkan data tersebut dilakukan outlier data hasil pengujian setelah outlier data nilai signifikan yaitu 0,136 seperti yang terlihat pada tabel sebelumnya $0,136 > 0,05$ sehingga data tersebut dapat dikatakan telah berdistribusi normal dan layak digunakan untuk uji analisis selanjutnya.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kolerasi antara variabel bebas dalam suatu regresi linier berganda untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan korelasi antara variabel tersebut dapat diketahui apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikoleniaritas dan apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolineritas. Berikut adalah hasil uji Multikolinearitas :

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.414	4.928		1.099	.278		
Akuntabilitas	.413	.141	.372	2.939	.005	.536	1.867
Transparansi	.180	.088	.255	2.042	.048	.551	1.816
Partisipasi Masyarakat	6.313	1.973	.345	3.199	.003	.741	1.350

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

Sumber : *data Primer diolah 2022*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel akuntabilitas yaitu 0,536, nilai tolerance variabel transparansi yaitu 0,551, nilai tolerance partisipasi masyarakat 0,741, nilai tolerance pada masing-masing variabel memiliki nilai > dari 0,10 dan nilai VIF pada masing-masing variabel < dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen pada penelitian ini.

4.4.3 Uji Heterokdastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dan residual dalam satu penegamatan kepengamatan yang lain dalam uji heteroskedastisitas peneliti menggunakan uji Glejser, berikut adalah hasil dari uji Glejser :

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6.954	3.182		-2.186	.035
Akuntabilitas	.041	.091	.090	.454	.652
Transparansi	-.008	.057	-.026	-.133	.895
Partisipasi Masyarakat	2.531	1.274	.335	1.987	.054

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : *data Primer diolah 2022*

Berdasarkan tabel hasil uji Glejser dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel Akuntabilitas yaitu 0,652 nilai signifikan variabel Transparansi yaitu 0,895 dan nilai signifikan variabel partisipasi masyarakat yaitu 0,054, apabila nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, masing-masing variabel pada penelitian ini memiliki nilai signifikan > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

4.5. Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Regresi Linier Berganda

Uji analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat (dependen) dengan variabel tidak terikat (independen), berikut adalah hasil uji analisis regresi linier berganda :

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.414	4.928		1.099	.278
Akuntabilitas	.413	.141	.372	2.939	.005
Transparansi	.180	.088	.255	2.042	.048
Partisipasi Masyarakat	6.313	1.973	.345	3.199	.003

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

Sumber : *data Primer diolah 2022* Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda , diperoleh nilai koefisien variabel X_1 0,413 nilai koefisien variabel X_2 yaitu 0,180 dan nilai koefisien variabel X_3 yaitu 6,313 adapun model persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

\hat{Y} : Variabel dependen (nilai yang diprediksikan).

α :Konstanta

β_1 - β_3 :Koefisien regresi variabel $X_1 - X_3$

X_1 :Akuntabilitas

X_2 : Transpransi

X_3 : Partisipasi Masyarakat

e : Standard Error

Sehingga persamaan yang diperoleh yaitu :

$$Y = 5,414 + 0,413 X_1 + 0,180 X_2 + 6,313 X_3 + e$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai α sebesar 5,414 merupakan nilai konstanta atau keadaan saat variabel pemberdayaan masyarakat belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel Akuntabilitas X_1 , Variabel Transparansi X_2 , Variabel Partisipasi masyarakat X_3 jika variabel dianggap konstan maka nilai pemberdayaan masyarakat sebesar 5,414.
2. Nilai koefisien regresi (X_1) sebesar 0,413 menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap Variabel pemberdayaan masyarakat yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel akuntabilitas maka akan mempengaruhi variabel pemberdayaan masyarakat sebesar 0,413 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dianggap konstan.
3. Nilai Koefisien regresi (X_2) sebesar 0,180 menunjukkan bahwa variabel Transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap variabel pemberdayaan masyarakat yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel transparansi maka akan mempengaruhi variabel pemberdayaan masyarakat sebesar 0,180 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dianggap konstan.
4. Nilai Koefisien regresi (X_3) sebesar 6,313 menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap variabel pemberdayaan masyarakat yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel partisipasi masyarakat maka akan mempengaruhi variabel pemberdayaan masyarakat sebesar 6,313 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

4.5.2 Uji Parsial (*t- test*)

Pengujian parsial pada dasarnya sering digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaann masyarakat dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan ketentuan *degree of freedom* (df) = n-k dengan memperhatikan tingkat signifikan sebesar α 5%. Berikut adalah hasil uji parsial (t-test)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.414	4.928		1.099	.278
Akuntabilitas	.413	.141	.372	2.939	.005
Transparansi	.180	.088	.255	2.042	.048
Partisipasi Masyarakat	6.313	1.973	.345	3.199	.003

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji parsial (t-test) diketahui nilai t tabel *degree of freedom* (df) = 45-4=41 dengan tingkat signifikan α 5% maka diperoleh nilai t tabel sebesar 2,019 sehingga dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Variabel Akuntabilitas

Berdasarkan perhitungan SPSS yaitu hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh Akuntabilitas (X_1) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) Nilai Signifikan adalah $0,005 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,939 > 2,019$ maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa keuangan Desa harus dikelola secara akuntabel.⁶² Undang- Undang no. 6 tahun 2014 pasal 24 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah gagasan yang menentukan bahwa setiap tindakan dan hasilnya harus memiliki dasar yang dapat dipertanggung jawabkan dalam penyelenggaraan

⁶² Peraturan Menetri Dalam Negeri RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa

pemerintah desa.⁶³ Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supami Wahyu Sulistyowati (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa, akuntabilitas dapat membantu dalam menunjang pembangunan desa dan dengan adanya akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa.⁶⁴

2. Variabel Transparansi

Berdasarkan perhitungan SPSS yaitu hasil uji parsial dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh Transparansi (X_2) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) adalah $0,048 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,042 >$ dari nilai t tabel $2,019$ maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima artinya transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan. Penelitian ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan dana Desa harus dikelola dan digunakan secara transparan dan dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat, dengan adanya transparan ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vitri Nur Indarti (2018)⁶⁵ yaitu dengan judul pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Variabel Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan perhitungan SPSS yaitu hasil uji parsial dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh Partisipasi Masyarakat (X_3) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) adalah $0,003 <$ dari $0,05$ dan nilai t hitung $3,199 >$ dari nilai t tabel $2,019$ maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima artinya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh

⁶³ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁶⁴ *Ibid*, Supami Wahyu Sulistyowati...

⁶⁵ *Ibid*, Vitri Nur Indarti...

terhadap pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif secara signifikan di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.

4.5.3 Uji Simultan (*f-test*)

Uji simultan (F-test) digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Berikut adalah hasil uji simultan (F-test) :

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	70.120	3	23.373	25.093	.000 ^b
Residual	38.191	41	.931		
Total	108.311	44			

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber : *data Primer diolah 2022*

Berdasarkan hasil uji simultan (F-test) diketahui nilai F hitung yaitu 25,093 dan nilai F tabel yaitu 2,01954 nilai F hitung $25,093 > 2,01954$ dengan nilai signifikan 0,000 dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat di uji secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana Desa di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.

4.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi yaitu:

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.861 ^a	.742	.723	.981
a. Predictors: (Constant), Partisipasi masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas				
b. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat				

Dari hasil tersebut diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,723 artinya bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat sebesar 72,1% dan sisanya 27,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Untuk mengetahui informasi tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat peneliti menyebar kuesioner kepada responden sebanyak 50 orang untuk menjawab permasalahan atau pernyataan-pernyataan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan, untuk mengolah data hasil penelitian dari penyebaran kuesioner peneliti menggunakan bantuan aplikasi program SPSS versi 25, sehingga hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

Kode	Hipotesis	Hasil Uji Hipotesis
H1	Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.	Diterima
H2	Transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Diterima

Kode	Hipotesis	Hasil Uji Hipotesis
	Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.	
H3	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.	Diterima

Tabel di atas menjelaskan mengenai hasil dari hipotesis penelitian sehingga mengasilkkan hipotesis yang diterima atau di tolak.

1. H1 : Diterima

Variabel Akuntabilitas (X_1) terhadap pemberdayaan masyarakat
Diketahui bahwa akuntabilitas (X_1) hasil nilai nilai t hitung yaitu 2,939 pada sig 0,005 dan t tabel 2,019 maka t hitung > dari t tabel (2,939 > 2,019) dan signifikan < 0,05 (0,005 < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

2. H2 : Diterima

Variabel Transparansi (X_2) terhadap pemberdayaan masyarakat
Dapat dilihat bahwa Tranparansi (X_2) diketahui nilai t hitung yaitu 2,042 pada signifikan 0,048 dan t tabel 2,019 maka t hitung lebih besar dari t tabel (2,042 > 2,019) dan signifikan < 0,05 (0,042 < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

3. H3 : Diterima

Variabel Partisipasi masyarakat (X_3) terhadap pemberdayaan masyarakat
Dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat (X_3) diketahui nilai t hitung yaitu 3,199 pada signifikan 0,003 dan t tabel 2,019 maka t hitung lebih besar dari t tabel (3,199 > 2,029 dan signifikan < 0,05 (0,003 < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulan bahwa partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

4.7 Intrepetasi Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh perangkat desa dalam mengelola dana desa praktik akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan adanya proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dari hasil uji parsial (t-test) nilai t hitung yaitu 2,939 dan t tabel 2,019 nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel artinya akuntabilitas memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan. Berdasarkan hasil hipotesis tersebut bahwa akuntabilitas dalam pengelolan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan dana desa dikelurahan Tambakaji. Berdasarkan hasil tersebut Kelurahan Tambakaji telah menerapkan akuntabilitas dalam setiap tindakan baik kejujuran, hukum, manejerial program maupun kebijakan, oleh karena itu akuntabilititas secara umum telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. selain itu upaya bentuk pertanggung jawaban dalam melaksanakan akuntabilitas yaitu dengan memberikan informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat dengan tujuan agar akuntabilitas dapat berkembang dalam pemerintahan dimana keterbukaan dapat dihargai sebagai landasan pertanggung jawaban.

Berdasarkan hasil tersebut Kelurahan Tambakaji telah menerapkan prinsip akuntabel dalam setiap kebijakan, sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan. Hasil dari peneilitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulisty, Supami Wahyu 2019 bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana Desa dalam Pembangunan Desa yaitu menjalankan akuntabilitas dengan adanya tahap proses

pembuatan keputusan dan sosialisasi kebijakan, dalam penelitian tersebut akuntabilitas telah dijalankan sebesar 64,53%.⁶⁶

4.7.2 Pengaruh Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.

Salah satu komponen terpenting dalam pengelolaan keuangan dana Desa adalah adanya prinsip transparansi, menurut keagenan *theory agency* pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal tidak mendapatkan informasi yang sama dengan adanya transparansi ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif sehingga tidak terjadi asimetri informasi antara kedua belah pihak.

Transparansi merupakan bentuk akses jaminan informasi, dengan adanya transparansi dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, adanya transparansi masyarakat dapat mengetahui proses, pelaksanaan, penyelenggaraan dan mengetahui hasil yang telah tercapai. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat diketahui dari hasil uji parsial (t-test) nilai t hitung yaitu 20,42 dan t tabel 2,019 nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sehingga Transparansi memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.

Berdasarkan hasil tersebut bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kelurahan Tambakaji telah dilaksanakan dengan baik bukti transparansi tersebut Kelurahan Tambakaji memberikan informasi berupa pengumuman dan musyawarah dengan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani, Matia 2018 hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana Desa hal ini

⁶⁶ *Ibid*, Supami Wahyu Sulistyowati...

ditunjukkan dengan adanya papan informasi dalam setiap kegiatan sehingga masyarakat mudah mengakses informasi tersebut.⁶⁷

4.7.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.

Tujuan utama keuangan desa adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, maka dari itu partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen kunci yang harus ada dalam pemberdayaan masyarakat. Peran dan kontribusi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat merupakan komponen penting untuk mencapai tujuan pembangunan secara keseluruhan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat juga penting karena masyarakatlah yang memiliki sarana, suara, dan kemauan untuk membuat perbedaan. Terwujudnya pemerintahan yang baik, yang merupakan upaya mempercepat transformasi masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya, sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa sehingga hasil hipotesis dari variabel partisipasi masyarakat pada penelitian ini yaitu diketahui nilai F hitung $3,119 > F$ tabel yaitu 2.019 nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sehingga variabel partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.

Upaya adanya partisipasi masyarakat yaitu berdasarkan hasil setuju dari jawaban responden sehingga dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat selalu bersedia menyumbangkan ide, keterampilan dan tenaga untuk memajukan pemberdayaan masyarakat, serta selalu aktif dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulisty, Supami Wahyu (2019) berdasarkan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dalam pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan Desa.

⁶⁷ *Ibid*, Andriani Mutia...

4.7.4. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan.

Berdasarkan hasil analisis Variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat secara bersama mempengaruhi variabel pemberdayaan masyarakat hasil dari variabel Akuntabilitas diketahui nilai F hitung yaitu $2.939 > F \text{ tabel } 2.019$, Variabel Transparansi nilai F hitung $2.042 > F \text{ tabel } 2.019$ dan Variabel Partisipasi Masyarakat Nilai F hitung yaitu $3,199 > \text{ dari } F \text{ tabel } 2,019$. Dalam pelaksanaan akuntabilitas kelurahan Tambakaji telah menerapkan akuntabel sehingga pada setiap pengelolaan dana dapat dipertanggung jawabkan, dalam pelaksanaan tranparansi pemerintah kelurahan telah memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai pengelolaan dana untuk pemberdayaan masyarakat dan dalam partisipasi masyarakat masyarakat diberikan aspirasi untuk menyampaikan pendapat dan selalu diadakan musyawarah dengan masyarakat sehingga dengan adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana Desa di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan. Dalam hal ini kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan telah akuntabel dalam pengelolaan keuangan dana desa sehingga dapat dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa nilai signifikan variabel akuntabilitas yaitu 0,005 lebih kecil dari 0,05 sehingga nilai tersebut telah memenuhi syarat bahwa nilai signifikan harus lebih kecil dari 0,05 upaya kelurahan tambakaji dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas yaitu dengan adanya realisasi laporan pertanggungjawaban kebijakan pada setiap program kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Transparansi dalam pengelolaan dana berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat Desa di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan. Dalam hal ini Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan telah melaksanakan prinsip transparansi dapat dibuktikan dengan hasil penelitian nilai signifikan variabel transparansi yaitu 0,048 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga nilai tersebut telah memenuhi syarat bahwa nilai signifikan harus lebih kecil dari 0,05 dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu adanya prinsip transparansi agar masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi mengenai pengelolaan dana maupun pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji Upaya pelaksanaan prinsip transparansi yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat dengan adanya kegiatan musyawarah.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai

4. signifikan variabel partisipasi masyarakat nilai signifikan yaitu 0,003 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga nilai tersebut telah memenuhi syarat signifikan. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat penting adanya partisipasi masyarakat dengan adanya peran aktif dari masyarakat dapat meningkatkan terwujudnya program-program dalam pemberdayaan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian saran untuk peneliti selanjutnya yaitu

1. Untuk memastikan agar responden tidak merasa takut dan merasa aman atas informasi yang diberikan saat pengisian kuesioner, kita yang menyebarkan kuesioner harus memperkenalkan diri dengan baik sebelum memberikan kuesioner kepada responden.
2. Peneliti dimasa yang akan datang dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi, dan untuk peneliti dimasa yang akan datang supaya dapat memberikan tambahan variabel agar dapat menambah pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk Kelurahan Tambakaji kecamatan Ngaliyan agar dapat meningkatkan bentuk akuntabilitas dan transparansi agar masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi dalam pengelolaan dana kelurahan dan masyarakat dapat berperan aktif untuk melaksanakan program-program pemberdayaan

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Matia. Skripsi “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa”.(Sumbawa: Universitas Teknologi Sumbawa, 2018).
- Amrullah, Rifkayanti Skripsi : “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa”. (Semarang: Universitas Islam Negeri Uin Walisongo Semarang, 2019). H 46.
- August Ferdinand. (2014) *Metode Penelitian Manajemen* (5 ed). Jawa Tengah : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dra. Loina Lalolo Krina, “Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi,& Partisipasi Masyarakat Sekretariat Good Publik Governance”. (Jakarta: Badan Pembangunan Nasional, 2003).
- Hermawan, Ridwan Indra, Dkk., *Jurnal Akuntansi Aktiva*. ‘Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah’, 2.2 (2021), 153–59.
- Hidayat, Rahmat, dan Candra Wijaya, *Ayat-ayat Alqur’an tentang Manajemen Pendidikan Islam*, Medan: LPPI, 2017.
- Kalbarini, Rahmah Yulisa “Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah”, *JEESTT*, VOL. 1. No 7 Juli 2014, Surabaya : Universitas Airlangga, h 507
- Mardiasmo. 2002. “Akuntansi Sektor Publik”. Yogyakarta: Andi Offset
- Meidylisa Patty, ‘Akuntabilitas Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa’, *Jurnal Ekonomi Sosial & Humaniora*, Vol. 01 No 9 (2020).
- Napisah, Lilis Saidah “Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi’, *JRAK Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Volume 6 No (2020), 83.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa (2014) Shafratunnisa, Fierdha Skripsi : “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders Di SD Islam Binakheir” (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah. 2015), Hal. 28
- Sulistyo, Supami Wahyu. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Volume 7, (2019), 9.
- Siti Susanti Rahmah, ‘Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa’, JOM FEB, Volume 6 (2019).
- Siti Wahyuni Ramdhani, ‘Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat’, Jurnal Administrasi Negara, 2019.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta
- Tundunaung, Liong ‘Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tarang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud’, Jurnal Jurusan Pemerintahan, Volume 1 (2018). Universitas Sam Ratulangi h, 4
- Umaira, Adnan Siti. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi(JIMEKA), Vol. 4, (2019), 472.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wempy Banga. 2017. Administrasi Keuangan Negara dan Daerah, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wida, Siti Ainul Dkk., ‘Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kecamatan Rojongampi Kabupaten Banyuwangi’, E- Journal Ekonomi Dan Akuntansi, Voume IV ((2017), 148–152.
- Darma, Budi 2021 “Statistika Penelitian Menggunakan SPSS”. JAKARTA : GUEPEDIA. (Dikunjungi Pada 21 Agustus 2021) dihalaman <https://books.google.co.id/books?id=acpLEAAQBAJ&lpg=PA41&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>
- Duli, Nikolous. 2019 Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Penulisan Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS

Edisi Pertama. Sleman: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA. (Dikunjungi pada 23 Agustus 2021) dihalaman <https://books.google.co.id/books?id=A6fRDwAAQBAJ&pg=PA114&dq=Asumsi+klasik&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiFuizyoPtAhUaWX0KHRrRA6QQ6AEwAXoECAMQAg%20-%20v=onepage&q=Asumsi%20klasik&f=false>

Databoks, 'ICW : Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021', (Di Akses pada 4 Februari 2023) di halaman : <https://databoks.kadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, '2020, Dana Desa Fokus Pada Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa', Kemenkopmk.Go.Id, 2020(Diakses pada 3 September) di halaman <https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa>

Non Probability Sampling Pertemuan X(Diakses Pada Tanggal 19 Agustus) dihalaman <https://docplayer.info/31778223-Non-probability-sampling-pertemuan-x.html>

Purnomo, Rohmat Aldy. "Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS" Edisi Ketiga. Ponorogo: CV. WADE GROUP.(Dikunjungi pada 28 Agustus 2021) dihalaman https://books.google.co.id/books?id=MQCGDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false%0A%0A

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454
Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 4007/Un.10.5/D1/PG.00.00/12/2021

01 Desember 2021

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : ILSA RUSMIATI
Nim : 1805046038
Semester : VII
Jurusan / Prodi : S1 Akuntansi Syariah
Alamat : Kp Cigarung desa Mekarsari kec Cipongkor kab Bandung Barat
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
Waktu Penelitian : 2 Desember – Selesai
Lokasi Penelitian : Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang JawaTengah

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

LAMPIRAN 2
KUESIONER PENELITIAN
KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth :

Bapak /Ibu/ Saudara/ Saudari

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya penyusunan Jurnal dan Skripsi sebagai Mahasiswa Program studi Akuntansi Syariah Starata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Walisongo Semarang, Saya :

Nama : Ilsa Rusmiati

NIM : 1805046038

Bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian guna penyusunan jurnal dan Skripsi dengan judul “ ***Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus : Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan)***”

Untuk itu diharapkan Bapak /Ibu /saudara/ Saudari berkenan menjadi responden dalam penelitian ini dengan mengisi lembar kuesioner secara lengkap adapun data yang diperoleh hanya digunakan oleh peneliti untuk penelitian tidak digunakan dalam hal-hal lain sehingga kerahasiaan bapak/ibu/saudara/saudari tetap terjaga.

Hormat Saya



Ilsa Rusmiati

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Dimohon Bapak / Ibu / Saudara /Saudari untuk mengisi semua pernyataan/ pertanyaan yang telah disediakan
2. Berilah Tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilihlah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya

B. IDENTITAS RESPONDEN

- Nama :
- Jabatan :
- Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
- Umur : 17-25 thn 26-30 thn 31-40 thn 41-50 thn
 >50 thn
- Pekerjaan : Tidak Bekerja Karyawan Swasta PNS
 Wiraswasta Pedagang Nelayan Petani Lainnya.....

C. KETERANGAN PILIHAN JAWABAN

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang dipilih sesuai dengan pilihan Bapak / Ibu / Saudara (i)

- SS = Sangat Setuju = 5
- S = Setuju = 4
- N = Netral = 3
- TS = Tidak Setuju = 2
- STS = Sangat Tidak Setuju = 1

D. Daftar Pertanyaan

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
Akuntabilitas		1	2	3	4	5
1	Laporan keuangan kelurahan telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku					
2	Semua jenis pengeluaran kelurahan telah tercatat dengan baik dalam laporan keuangan					
3	Tahapan pengelolaan dana kelurahan melibatkan seluruh unsur masyarakat					
4	Pengelolaan dana desa telah di awasi dengan baik oleh tim pelaksana					
Transparansi						

5	Pihak kelurahan menyediakan informasi mengenai rencana sumber dan pengalokasian dana desa					
6	Terdapat akses yang mudah untuk mengetahui dokumen tentang pengelolaan dana kelurahan					
7	Adanya keterbukaan mengenai pengelolaan dana kelurahan kepada seluruh masyarakat					
8	Laporan pertanggung jawaban dana kelurahan telah dipublikasikan kepada masyarakat					
Partisipasi Masyarakat						
9	Masyarakat selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan tentang pengelolaan dana kelurahan					
10	Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, saran, maupun kritikan kepada pengelola dana kelurahan					
11	Masyarakat bersedia untuk berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian keterampilan maupun tenaga untuk pelaksanaan program kelurahan					
12	Masyarakat bersedia untuk mengaplikasikan, menjaga, dan melestraikan hasil dari program yang dilakukan oleh kelurahan					
Pemberdayaan masyarakat (y)						
Kemampuan						
13	Adanya pelatihan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai teknologi yang yang tersedia sebagai pendukung aktivitas					
Kepercayaan						
14	Masyarakat dapat menerima informasi dengan baik mengenai pengelolaan keuangan kelurahan					
15	Masyarakat memberikan kepercayaan dengan sepenuhnya kepada pengelola keuangan kelurahan yang telah dilaksanakan oleh pengelola dana kelurahan					
16	Informasi yang diberikan mengenai pengelolaan dana kelurahan dapat ditanggapi serius oleh masyarakat					
Wewenang						
17	Masyarakat diberikan wewenang dalam menyampaikan aspirasi					
18	Masyarakat diberikan wewenang untuk membantu mensukseskan program yang diadakan oleh kelurahan					
Tanggung Jawab						
19	Seluruh masyarakat diberikan tanggung jawab untuk mengetahui pengelolaan dana desa					
20	Tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat					

	dalam pengelolaan dana kelurahan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan					
--	--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN 3

KARAKTERISTIK RESPONDEN

1) Karakteristik berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah(orang)	Persentase
Laki-laki	26	52%
Perempuan	24	48%
Jumlah	50	100%

2) Karakteristik Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase (%)
17-25	8	16%
26-30	9	18%
31-40	12	24%
41-50	14	28%
> 50	7	14%
Jumlah	50	100%

3) Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Karyawan Swasta	15	30%
PNS	0	0%
Wiraswasta	10	20%
Pedagang	7	14%
Nelayan	0	0%
Petani	0	0%
Lainya	13	26%

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Tidak Bekerja	5	10%
Jumlah	50	100%

LAMPIRAN 4

JAWABAN RESPONDEN

Tabel Data Hasil Kuesioner

NO RESPONDEN	AKUNTABILITAS (X1)				TOTAL X1	TRANSPARANSI (X2)				TOTAL X2	PARTISIPASI MASYARAKAT (X3)				TOTAL X3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Y)								TOTAL (Y)		
	X1	X2	X3	X4		x1	X2	X3	X4		X1	X2	X3	X4		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
1	4	4	4	4	16	4	2	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
2	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
3	4	4	4	4	16	4	3	3	3	13	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
6	4	4	4	4	16	4	3	4	3	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
7	4	4	4	4	16	4	3	4	3	14	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
8	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	4	4	4	4	16	4	2	4	4	14	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
10	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
14	4	4	4	4	16	4	2	2	2	10	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
15	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
16	4	4	4	4	16	4	2	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
17	4	4	4	4	16	4	2	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	39
20	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
21	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	4	4	5	5	18	3	4	4	4	15	3	4	4	3	14	4	4	4	5	5	3	3				32
23	3	4	2	3	12	4	2	2	2	10	2	3	4	4	13	5	3	3	3	4	4	3	4			29
24	3	4	1	3	11	4	2	2	2	10	2	3	4	4	13	5	3	3	3	4	4	3	4			29
25	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
26	4	4	1	5	14	3	3	3	2	11	2	5	5	4	16	5	4	4	4	4	4	4	2	4		31
27	4	4	1	5	14	3	3	3	2	11	2	5	5	4	16	4	4	4	4	4	4	4	2	4		30
28	2	4	4	4	14	4	2	4	2	12	4	5	4	5	18	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
29	4	4	4	4	16	5	3	4	4	16	4	5	5	5	19	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	34
30	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18	4	5	5	5	19	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
31	4	4	5	4	17	4	2	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
32	4	4	5	4	17	4	2	4	4	14	4	4	4	5	17	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
33	4	4	5	4	17	4	2	4	4	14	4	4	4	5	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	4	4	4	4	16	4	2	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
35	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
36	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
37	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
38	4	4	4	4	16	4	2	4	4	14	4	4	4	5	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
39	5	4	5	3	17	4	3	5	4	16	3	4	4	4	15	3	4	1	4	4	4	4	4	1		25
40	5	4	5	3	17	4	3	5	4	16	3	4	3	4	14	3	4	1	4	4	4	4	4	1		25
41	5	5	4	4	18	4	2	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
42	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	5	5	5	19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
44	4	4	2	4	14	2	3	3	2	10	2	5	5	5	17	5	4	2	3	5	4	3	4			30
45	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	5	5	5	4	19	4	4	4	4	4	4	4	5			33
46	4	4	4	4	16	4	3	3	3	13	5	5	5	4	19	4	4	3	5	5	3	4	5			33
47	5	4	4	4	17	4	1	3	3	11	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	2	4	5			31
48	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	4	4	4	4	4	5			31
49	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	5			33
50	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	5	5	4	4	5			36

LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI RESPONDEN



LAMPIRAN 6
HASIL OUTPUT SPSS

1. Hasil Uji Validitas dan Relibilitas

1) Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Pearson Correlation	R_{tabel}
Akuntabilitas	X1.1	0,746	0,2787
	X1.2	0,634	0,2787
	X1.3	0,808	0,2787
	X1.4	0,482	0,2787
Transparansi	X2.1	0,637	0,2787
	X2.2	0,783	0,2787
	X2.3	0,839	0,2787
	X2.4	0,893	0,2787
Partisipasi Masyarakat	X3.1	0,699	0,2787
	X3.2	0,821	0,2787
	X3.3	0,748	0,2787

	X3.4	0,720	0,2787
Pemberdayaan Masyarakat	Y1	0,452	0,2787
	Y2	0,657	0,2787
	Y3	0,812	0,2787
	Y4	0,689	0,2787
	Y5	0,531	0,2787
	Y6	0,433	0,2787
	Y7	0,556	0,2787
	Y8	0,712	0,2787

2) Hasil Uji Reliabilitas

Hasil Uji reliabilitas Reliability Statistics (Variabel X)

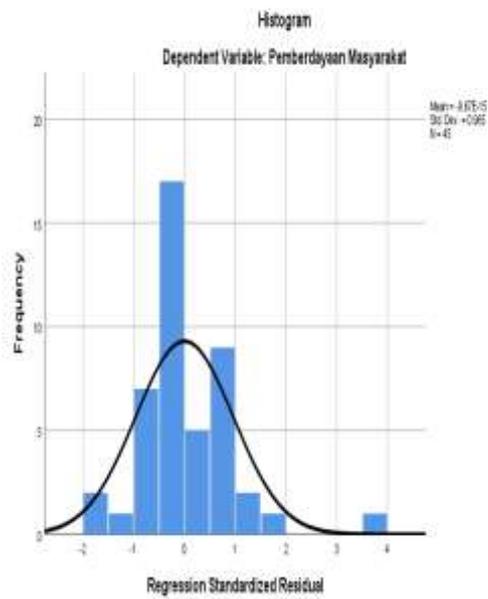
Cronbach's Alpha	N of Items
0.845	12

Sumber : Data Primer, diolah 2022

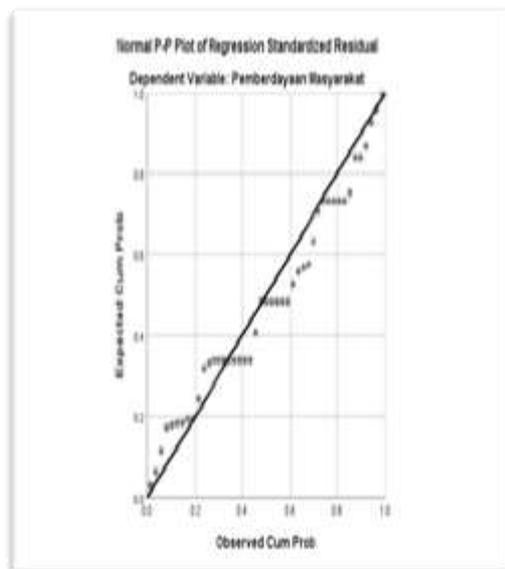
Reliability Statistics (Variabel Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
0 .745	8

2. Uji Asumsi Klasik
1) Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Normalitas Grafik P-plot



Hasil Uji Kolmogorov- Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.93165193
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.118
	Negative	-.097
Test Statistic		.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.136 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : *data Primer diolah 2022*

2) Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.414	4.928		1.099	.278		
Akuntabilitas	.413	.141	.372	2.939	.005	.536	1.867
Transparansi	.180	.088	.255	2.042	.048	.551	1.816
Partisipasi Masyarakat	6.313	1.973	.345	3.199	.003	.741	1.350

Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

Sumber : *data Primer diolah 2022*

3) Hasil Uji Heterokdastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6.954	3.182		-2.186	.035
Akuntabilitas	.041	.091	.090	.454	.652
Transparansi	-.008	.057	-.026	-.133	.895
Partisipasi Masyarakat	2.531	1.274	.335	1.987	.054

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : data Primer diolah 2022

4. Hasil Uji Hipotesis

1) Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

1. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.414	4.928		1.099	.278
	Akuntabilitas	.413	.141	.372	2.939	.005
	Transparansi	.180	.088	.255	2.042	.048
	Partisipasi Masyarakat	6.313	1.973	.345	3.199	.003

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

2) Hasil Uji Parsial (t-Test)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.414	4.928		1.099	.278
	Akuntabilitas	.413	.141	.372	2.939	.005
	Transparansi	.180	.088	.255	2.042	.048
	Partisipasi Masyarakat	6.313	1.973	.345	3.199	.003

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

3) Hasil Uji Simultan (F-Test)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	70.120	3	23.373	25.093	.000 ^b
	Residual	38.191	41	.931		
	Total	108.311	44			

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat , Transparansi, Akuntabilitas

Sumber : *data Primer diolah 2022*

4) Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.861 ^a	.742	.723	.981
a. Predictors: (Constant), Partisipasi masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas				
b. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat				

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ilsa Rusmiati
Tempat Tanggal Lahir : Bandung 02 Februari 2000
Agama : Islam
Alamat : Kp Cigarung RT 03 RW 07 Desa Mekarsari
KecamatanCipongkor Kabupaten Bandung
No telepon : 083139951291
Email : ilsarusmiati85@gmail.com
Riwayat Pendidikan Formal :

No	Pendidikan	Tahun
1	MI Cipongkor 1	2012
2	Mts Darul Inayah	2015
3	MA Darul Inayah	2018
4	Uin Walisongo Semarang	2018-Selesai